

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)



MATA KULIAH	:	Tata Kelola Pemerintahan
KODE MK	:	3KKBP204
SEMESTER	:	3

Tim Penyusun:

Dr. Sandi Prahara, S.T., M.Si.

(Program Studi Ilmu Pemerintahan — Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Ichsan Gorontalo)

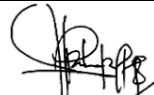
**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN (S1)
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
2023**

1. Analisis Pembelajaran

Diagram berikut menggambarkan keterkaitan konstruktif (constructive alignment) dari kemampuan awal, melalui Sub-CPMK secara berjenjang dan asesmen (UTS/UAS), hingga pencapaian CPL yang dibebankan pada mata kuliah ini.



2. Rencana Pembelajaran Semester

		UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN S1				Kode Dokumen RPS-3KKBP204	
RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER							
MATA KULIAH (MK)		KODE	Rumpun MK	BOBOT (sks)		SEMESTER	Tgl Penyusunan
Tata Kelola Pemerintahan		3KKBP204	MKWP	T=3	P=0	3	31 Mei 2023
OTORISASI		Pengembang RPS	Koordinator RMK		Ketua PRODI		
		 Dr. Sandi Prahara, S.T., M.Si. NIDN. 0929038602	 Dr. Sandi Prahara, S.T., M.Si. NIDN. 0929038602		 Purwanto, S.IP., M.Si. NIDN. 0926096601		
Capaian Pembelajaran (CP)	CPL-PRODI yang dibebankan pada MK						
	CPL-02	Menguasai konsep teoretis ilmu pemerintahan, ilmu politik, sosiologi, dan filsafat ilmu sebagai landasan menjelaskan dan menganalisis gejala pemerintahan serta politik.					
	CPL-03	Menguasai sistem pemerintahan Indonesia, hukum tata pemerintahan, hubungan pusat–daerah, serta penyelenggaraan pemerintahan daerah dan desa.					
	CPL-05	Mampu menerapkan fungsi manajemen pemerintahan — tata kelola sumber daya manusia, keuangan, organisasi, pelayanan publik, strategi, dan pengambilan keputusan — secara akuntabel.					
	CPL-10	Mampu mengembangkan inovasi pelayanan publik serta usaha dan layanan berbasis teknologi (technopreneurship) secara beretika, kreatif, kolaboratif, dan adaptif, serta berkontribusi bagi kemajuan masyarakat dan daya saing bangsa. — Penciri UNISAN.					
	Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)						
	CPMK1	Mahasiswa mampu menjelaskan konsep, prinsip, dan kerangka teoretis tata kelola pemerintahan (good governance) — meliputi pilar akuntabilitas, transparansi, partisipasi, dan rule of law — berdasarkan perspektif ilmu pemerintahan, ilmu politik, dan sosiologi sebagai fondasi analisis gejala pemerintahan kontemporer.					
	CPMK2	Mahasiswa mampu menganalisis sistem penyelenggaraan pemerintahan Indonesia — mencakup arsitektur kelembagaan, hukum tata pemerintahan, relasi pusat–daerah, dan otonomi desa — dengan menguraikan keterkaitan antara regulasi, kewenangan, dan praktik tata kelola di Kawasan Timur Indonesia sebagai konteks studi kasus.					

	CPMK3	Mahasiswa mampu menerapkan fungsi-fungsi manajemen pemerintahan — perencanaan, pengorganisasian, pengelolaan SDM aparatur, pengelolaan keuangan daerah, dan pengambilan keputusan — secara akuntabel dalam simulasi pengelolaan unit pemerintahan, dengan menghasilkan dokumen perencanaan atau laporan kinerja unit pemerintahan fiktif yang terstruktur.
	CPMK4	Mahasiswa mampu mengevaluasi kualitas tata kelola dan kinerja pelayanan publik pada instansi pemerintah daerah — dengan menggunakan instrumen penilaian berbasis indikator good governance dan standar pelayanan minimum — melalui studi kasus nyata di lingkup Kawasan Timur Indonesia, dan menyajikan temuan dalam laporan evaluasi tertulis yang memuat rekomendasi perbaikan.
	CPMK5	Mahasiswa mampu merancang proposal inovasi tata kelola dan pelayanan publik berbasis teknologi (e-government/technopreneurship) yang beretika, kreatif, dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat lokal — dibuktikan dengan Business Process Map dan prototipe konseptual layanan digital pemerintahan yang mengintegrasikan nilai integritas dan keberpihakan pada masyarakat Kawasan Timur Indonesia — serta mempresentasikannya secara kolaboratif di hadapan kelompok.
	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	
	Sub-CPMK1	Menjelaskan konsep dan kerangka teoretis tata kelola pemerintahan (good governance) dari perspektif ilmu pemerintahan, ilmu politik, dan sosiologi, serta menyebutkan keempat pilar utamanya dengan contoh penerapan kontekstual.
	Sub-CPMK2	Membandingkan model-model dan pendekatan teoretis tata kelola pemerintahan (NPM, NPG, New Weberianism, Collaborative Governance) dalam tabel komparatif, serta mengidentifikasi relevansinya sebagai alat analisis gejala pemerintahan kontemporer di Indonesia.
	Sub-CPMK3	Menguraikan arsitektur kelembagaan dan hukum tata pemerintahan Indonesia — mencakup pembagian kewenangan eksekutif-legislatif-yudikatif serta kerangka regulasi penyelenggaraan pemerintahan — dengan memetakan keterkaitan antarlembaga dalam bagan kelembagaan.
	Sub-CPMK4	Menganalisis relasi pusat–daerah, otonomi daerah, dan tata kelola pemerintahan desa dengan menguraikan keterkaitan antara regulasi desentralisasi, kewenangan, dan praktik nyata tata kelola di Kawasan Timur Indonesia melalui studi kasus kabupaten/kota terpilih.
	Sub-CPMK5	Menerapkan fungsi perencanaan dan pengorganisasian pemerintahan dengan menyusun dokumen Rencana Kerja (Renja) fiktif unit pemerintahan daerah yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, program, dan indikator kinerja terukur secara akuntabel.
	Sub-CPMK6	Menerapkan fungsi pengelolaan SDM aparatur, pengelolaan keuangan daerah, dan pengambilan keputusan berbasis data dalam simulasi operasional unit pemerintahan, yang menghasilkan laporan kinerja fiktif terstruktur dengan analisis varians anggaran dan rekomendasi tindak lanjut.
	Sub-CPMK7	Mengevaluasi kualitas tata kelola pemerintahan daerah di Kawasan Timur Indonesia menggunakan instrumen penilaian berbasis indikator good governance melalui telaah dokumen publik (LPPD, LAKIP, laporan audit) dan wawancara/observasi terbatas, serta menghasilkan laporan evaluasi awal yang memuat temuan dan gap analysis.
	Sub-CPMK8	Mengevaluasi kualitas pelayanan publik instansi pemerintah daerah di Kawasan Timur Indonesia berdasarkan standar pelayanan minimum (SPM) dan kepuasan pengguna layanan, serta menyajikan laporan evaluasi lengkap yang memuat rekomendasi perbaikan yang dapat ditindaklanjuti.
	Sub-CPMK9	Merancang konsep inovasi tata kelola dan pelayanan publik berbasis e-government/technopreneurship yang adaptif terhadap kebutuhan masyarakat lokal Kawasan Timur Indonesia, dibuktikan dengan Business Process Map (as-is vs. to-be) dan prototipe konseptual layanan digital yang mengintegrasikan nilai integritas dan keberpihakan lokal.

	Sub-CPMK10	Mempresentasikan proposal inovasi tata kelola berbasis teknologi secara kolaboratif di hadapan kelompok, mempertahankan argumen desain dengan mengintegrasikan nilai integritas, kreativitas, dan adaptabilitas, serta merespons umpan balik secara konstruktif untuk penyempurnaan proposal akhir.					
		Korelasi CPMK terhadap Sub-CPMK					
		CPMK1	CPMK2	CPMK3	CPMK4	CPMK5	
	Sub-CPMK1	√	—	—	—	—	
	Sub-CPMK2	√	—	—	—	—	
	Sub-CPMK3	—	√	—	—	—	
	Sub-CPMK4	—	√	—	—	—	
	Sub-CPMK5	—	—	√	—	—	
	Sub-CPMK6	—	—	√	—	—	
	Sub-CPMK7	—	—	—	√	—	
	Sub-CPMK8	—	—	—	√	—	
	Sub-CPMK9	—	—	—	—	√	
	Sub-CPMK10	—	—	—	—	√	
	Jumlah	2	2	2	2	2	
		Korelasi CPL terhadap Sub-CPMK					
		CPL-02 (%)	CPL-03 (%)	CPL-05 (%)	CPL-10 (%)	Bobot penilaian (%)	Jumlah Minggu
	Sub-CPMK1	13				13	2
	Sub-CPMK2	7				7	1
	Sub-CPMK3	7	6			13	2
	Sub-CPMK4	7	6			13	2
	Sub-CPMK5		7	6		13	2
	Sub-CPMK6		4	3		7	1
	Sub-CPMK7	7		6		13	2
	Sub-CPMK8	4		3		7	1
	Sub-CPMK9			4	3	7	1
	Sub-CPMK10			4	3	7	1

		45	23	26	6	100	15
Deskripsi Singkat MK	Mata kuliah Tata Kelola Pemerintahan (3 SKS) mengkaji konsep, prinsip, dan kerangka teoretis good governance — meliputi pilar akuntabilitas, transparansi, partisipasi, dan rule of law — serta sistem penyelenggaraan pemerintahan Indonesia yang mencakup arsitektur kelembagaan, hukum tata pemerintahan, relasi pusat–daerah, dan otonomi desa, sebagai bagian dari Bahan Kajian Teori dan Sistem Pemerintahan serta Manajemen Pemerintahan dan Pelayanan Publik dalam kurikulum Program Studi Ilmu Pemerintahan UNISAN. Dalam kurikulum, mata kuliah ini berkedudukan sebagai mata kuliah keahlian inti yang memadukan landasan teoretis (CPL-02, CPL-03) dengan kompetensi terapan manajerial dan inovatif (CPL-05, CPL-10), sehingga menjadi jembatan antara kajian konseptual ilmu pemerintahan dan praktik pengelolaan pemerintahan yang akuntabel. Melalui pendekatan pembelajaran berbasis kasus dan proyek (Case-Based Learning dan Project-Based Learning sesuai SN-Dikti Pasal 14 dan KPT 2024), mahasiswa secara progresif bergerak dari menjelaskan konsep good governance, menganalisis sistem pemerintahan Indonesia dengan konteks studi kasus Kawasan Timur Indonesia, menerapkan fungsi manajemen dalam simulasi unit pemerintahan, hingga mengevaluasi kualitas pelayanan publik menggunakan instrumen indikator good governance dan standar pelayanan minimum. Relevansi mata kuliah ini bagi pembentukan karakter ICHSA-N tercermin dalam tuntutan integritas dan keberpihakan pada masyarakat lokal yang diwujudkan melalui tugas akhir berupa perancangan proposal inovasi tata kelola berbasis teknologi (e-government/technopreneurship) yang kreatif, etis, dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat Kawasan Timur Indonesia, dibuktikan dengan Business Process Map dan prototipe konseptual layanan digital pemerintahan yang dipresentasikan secara kolaboratif.						
Bahan Kajian: Materi Pembelajaran	1. Konsep dan prinsip good governance; 2. Pilar akuntabilitas, transparansi, partisipasi, rule of law; 3. Teori dan sistem pemerintahan Indonesia; 4. Arsitektur kelembagaan negara; 5. Hukum tata pemerintahan dan regulasi kewenangan; 6. Relasi pusat–daerah dan otonomi daerah; 7. Tata kelola pemerintahan desa; 8. Fungsi manajemen pemerintahan; 9. Pengelolaan SDM aparatur dan keuangan daerah; 10. Evaluasi kinerja pelayanan publik; 11. Inovasi e-government berbasis kebutuhan lokal; 12. Prototipe konseptual layanan digital pemerintahan.						
Pustaka	Utama :	(1) Osborne, D., dan Gaebler, T. (1992). Reinventing Government: How the Entrepreneurial Spirit is Transforming the Public Sector. Addison-Wesley; (2) Stoker, G. (1998). Governance as Theory: Five Propositions. International Social Science Journal, 50(155), 17-28; (3) Agere, S. (2000). Promoting Good Governance: Principles, Practices and Perspectives. Commonwealth Secretariat; (4) Prasetyo, B. A., dan Hoessein, B. (2002). Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan. Pustaka Pelajar; (5) Pollitt, C., dan Bouckaert, G. (2011). Public Management Reform: A Comparative Analysis. Edisi 3. Oxford University Press;					

		(6) Sedarmayanti. (2012). Good Governance: Pemerintahan yang Baik. Mandar Maju.					
		Pendukung :					
		(1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta perubahannya (Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015);					
		(2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;					
		(3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;					
		(4) Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Reformasi Birokrasi dan Standar Pelayanan Publik. Jakarta: KemenPAN-RB, 2023;					
		(5) Komisi Pemberantasan Korupsi. Survei Penilaian Integritas Instansi Pemerintah Daerah. Jakarta: KPK, 2023.					
Dosen Pengampu		Dr. Sandi Prahara, S.T., M.Si.					
Modalitas dan Matakuliah prasyarat		Modalitas: - Mata kuliah prasyarat: -					
Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bantuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (offline)	Daring (online)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1,2	Sub-CPMK1: Menjelaskan konsep dan kerangka teoretis tata kelola pemerintahan (good governance) dari perspektif ilmu pemerintahan, ilmu politik, dan sosiologi, serta menyebutkan keempat pilar utamanya dengan contoh penerapan kontekstual.	Mahasiswa mampu: - Menjelaskan pengertian tata kelola pemerintahan (good governance) menurut minimal tiga perspektif disiplin ilmu (ilmu pemerintahan, ilmu politik, sosiologi) secara tepat dan tidak saling tumpang tindih - Menyebutkan keempat pilar utama good governance (akuntabilitas, transparansi, partisipasi, rule of law)	Bentuk Penilaian Tes/Unjuk Kerja: Kuis lisan atau tertulis singkat (10 menit, akhir sesi): mengidentifikasi pilar good governance dari sebuah cuplikan berita pemerintahan lokal; dinilai berdasarkan ketepatan konsep, kelengkapan	BP — Mekanisme kuliah: Dosen membuka sesi dengan pertanyaan pemantik tentang pengalaman mahasiswa berinteraksi dengan layanan pemerintah, memfasilitasi diskusi kelas, memaparkan kerangka konseptual good governance dari ketiga perspektif disiplin ilmu menggunakan LCD proyektor, dan menutup dengan klarifikasi konsep serta penugasan refleksi	BP — Mekanisme kuliah: Dosen mengunggah video pengantar berdurasi 15-20 menit yang mengurai definisi good governance dari tiga perspektif disiplin ilmu dan empat pilar utamanya, disertai slide interaktif melalui Google Classroom atau Microsoft 365; dosen menyiapkan forum diskusi asinkron dengan pertanyaan pemantik berbasis kasus nyata (via	Bahan Kajian: - Konsep dan definisi tata kelola pemerintahan (good governance) dari perspektif ilmu pemerintahan, ilmu politik, dan sosiologi; - Empat pilar utama good governance: akuntabilitas, transparansi, partisipasi, dan rule of law; - Contoh penerapan pilar good governance dalam konteks pemerintahan Indonesia dan Kawasan	13

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bantuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (<i>offline</i>)	Daring (<i>online</i>)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		beserta definisi operasional masing-masing • Memberikan satu contoh penerapan konkret tiap pilar good governance dari konteks penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia, termasuk dari Kawasan Timur Indonesia • Membedakan tata kelola pemerintahan yang baik dari tata kelola yang buruk berdasarkan indikator yang dapat diamati	empat pilar, dan relevansi contoh yang diberikan Partisipasi kelas & laboratorium: Keaktifan dalam diskusi pembuka: mahasiswa merespons pertanyaan pemantik tentang pengalaman langsung berinteraksi dengan layanan pemerintah; dinilai dari kedalaman argumen, sikap kritis yang santun (Integrity), dan kesediaan mendengarkan perspektif rekan Tugas: Refleksi tertulis individual (250-350 kata):	(tatap muka di kelas). Mekanisme & materi: Mahasiswa berdiskusi dalam kelompok kecil (3-4 orang) untuk mengidentifikasi keempat pilar good governance dari satu kasus singkat yang diberikan dosen di papan tulis, kemudian mempresentasikan temuan kelompok secara lisan selama 2-3 menit MP — Metode Pembelajaran: Case-Based Learning: kelompok kecil menganalisis skenario kasus fiktif-kontekstual tentang penyelenggaraan layanan pemerintahan di kabupaten/kota kawasan Sulawesi atau Indonesia Timur, mengidentifikasi pilar-pilar good governance yang diterapkan atau dilanggar, dan mendiskusikan	LMS; sinkron/asinkron). Mekanisme & materi: Mahasiswa menyimak video pengantar, membaca ringkasan konsep yang disediakan dosen, dan merespons pertanyaan pemantik di forum diskusi dengan mengaitkan konsep pilar good governance pada satu contoh kasus pemerintahan daerah yang mereka pilih sendiri MP — Metode Pembelajaran: Case-Based Learning: mahasiswa menganalisis cuplikan berita atau laporan singkat tentang kondisi tata kelola pemerintahan daerah di Indonesia (diutamakan Kawasan Timur Indonesia) sebagai bahan diskusi forum, kemudian mengidentifikasi pilar mana yang tampak atau	Timur Indonesia; Pustaka: Stoker (1998); Agere (2000); Sedarmayanti (2012).	

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (<i>offline</i>)	Daring (<i>online</i>)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			memilih satu layanan pemerintahan di lingkungan sekitar mahasiswa dan mengidentifikasi kehadiran atau ketiadaan keempat pilar good governance pada layanan tersebut, dikumpulkan melalui SISTER/IAKAD UNISAN	implikasinya bagi masyarakat setempat Estimasi Waktu: PB 3×50' · PT 3×60' · KM 3×60'. Tugas: Mahasiswa memilih secara mandiri satu unit atau jenis layanan pemerintahan yang pernah mereka gunakan atau amati secara langsung (misalnya kantor desa, puskesmas, dinas kependudukan) dan menulis refleksi tertulis yang mengidentifikasi kehadiran atau ketiadaan tiap pilar good governance (akuntabilitas, transparansi, partisipasi, rule of law) pada layanan tersebut, disertai penilaian singkat tentang dampaknya terhadap kepercayaan publik Deliverable: Dokumen refleksi tertulis individual, 250-350 kata, format PDF, dikumpulkan melalui SISTER/IAKAD	absen dalam kasus tersebut Estimasi Waktu: PB 3×50' · PT 3×60' · KM 3×60'.		

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (offline)	Daring (online)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				UNISAN paling lambat tiga hari setelah sesi tatap muka; mencantumkan nama layanan yang dipilih, identifikasi tiap pilar beserta bukti empiris, dan satu rekomendasi perbaikan berbasis prinsip good governance			
			Bentuk Penilaian Tes/Unjuk Kerja: Tidak ada tes formal di minggu ini; penilaian berfokus pada kualitas analisis dalam diskusi dan tugas kelompok Partisipasi kelas & laboratorium: Kontribusi dalam diskusi kasus kelompok: dinilai dari kemampuan mengajukan argumen berbasis konsep pilar good	BP — Mekanisme kuliah: Dosen memfasilitasi presentasi singkat tiap kelompok (5-7 menit) disertai sesi tanya jawab antar-kelompok; dosen memberikan umpan balik langsung tentang ketepatan identifikasi pilar dan kualitas rekomendasi yang diajukan, serta menekankan nilai integritas dalam pelaporan kinerja pemerintahan (Integrity) (tatap muka di kelas). Mekanisme & materi: Tiap kelompok mempresentasikan hasil	BP — Mekanisme kuliah: Dosen menyediakan materi lanjutan berupa studi kasus tertulis (2-3 halaman) tentang praktik tata kelola di salah satu pemerintahan daerah di Kawasan Timur Indonesia, diunggah di Google Classroom; dosen membuka sesi diskusi sinkron singkat (30 menit) untuk klarifikasi analisis kelompok (via LMS; sinkron/asinkron). Mekanisme & materi: Mahasiswa dalam kelompok membaca	Bahan Kajian: • Pendalaman analitis pilar akuntabilitas: dimensi vertikal dan horizontal dalam pemerintahan daerah; • Pendalaman analitis pilar transparansi: mekanisme keterbukaan informasi publik; • Pendalaman analitis pilar partisipasi: kanal dan kualitas keterlibatan warga; • Pendalaman analitis pilar rule of law: supremasi hukum dan	

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (<i>offline</i>)	Daring (<i>online</i>)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			governance (bukan opini semata), kualitas mendengar aktif, dan sikap kolaboratif lintas perspektif antar-anggota kelompok (Harmony); mahasiswa yang hanya hadir tanpa kontribusi substantif tidak mendapat nilai partisipasi penuh Tugas: Laporan analisis kelompok (500-650 kata atau setara tabel analisis 1 halaman A4): pemetaan pemenuhan empat pilar good governance pada satu kasus pemerintahan daerah yang dipilih kelompok,	pemetaan pilar good governance menggunakan slide atau tabel di papan tulis; kelompok lain memberikan tanggapan kritis berbasis konsep yang telah dipelajari pada minggu sebelumnya MP — Metode Pembelajaran: Case-Based Learning: presentasi dan diskusi antar-kelompok berbasis kasus pemerintahan daerah; dosen mendorong perbandingan antar-kasus yang dipilih masing-masing kelompok untuk memperkaya pemahaman variasi implementasi pilar good governance di berbagai konteks daerah Estimasi Waktu: PB 3×50' · PT 3×60' · KM 3×60'. Tugas: Kelompok (4-5 mahasiswa) memilih satu kasus penyelenggaraan	studi kasus yang disediakan, berdiskusi secara daring menggunakan fitur kolaborasi Google Docs atau Microsoft Teams, dan menyusun pemetaan pilar good governance secara bersama sebelum sesi luring MP — Metode Pembelajaran: Case-Based Learning: kelompok menganalisis kasus nyata atau semi-fiktif pemerintahan daerah, memetakan bukti penerapan dan pelanggaran tiap pilar, dan mempersiapkan hasil analisis untuk dipresentasikan pada sesi luring Estimasi Waktu: PB 3×50' · PT 3×60' · KM 3×60'.	kepatuhan regulasi; • Penilaian integritas instansi pemerintah daerah sebagai instrumen evaluasi pilar good governance; Pustaka: Agere (2000); Sedarmayanti (2012); Komisi Pemberantasan Korupsi (2023); Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (2023).	

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bantuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (<i>offline</i>)	Daring (<i>online</i>)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			dikumpulkan melalui SISTER/SIKAD UNISAN	pemerintahan daerah yang dapat diverifikasi dari sumber publik (berita resmi, laporan KPK, atau data KemenPAN-RB) dan menyusun laporan analisis yang memetakan pemenuhan tiap pilar good governance secara sistematis, menyertakan bukti/data pendukung untuk setiap pilar, mengidentifikasi pilar yang paling lemah, dan merumuskan satu rekomendasi perbaikan yang spesifik; laporan juga mencantumkan deklarasi kontribusi tiap anggota kelompok Deliverable: Laporan analisis kelompok dalam format dokumen Word atau PDF, terdiri atas narasi 500-650 kata atau tabel analisis empat kolom (pilar, indikator, bukti, penilaian) setara 1 halaman A4 ditambah narasi rekomendasi 100-150 kata; dikumpulkan			

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bantuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (offline)	Daring (online)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				melalui SISTER/SIKAD UNISAN paling lambat sebelum sesi pertemuan minggu berikutnya; bila menggunakan bantuan AI Generatif, wajib menyertakan lampiran prompt dan deklarasi penggunaan			
3	Sub-CPMK2: Membandingkan model-model dan pendekatan teoretis tata kelola pemerintahan (NPM, NPG, New Weberianism, Collaborative Governance) dalam tabel komparatif, serta mengidentifikasi relevansinya sebagai alat analisis gejala pemerintahan kontemporer di Indonesia.	Mahasiswa mampu: • Membandingkan karakteristik utama empat model tata kelola pemerintahan (New Public Management, New Public Governance, New Weberianism, Collaborative Governance) dalam tabel komparatif yang memuat minimal empat dimensi pembandingan • Mengidentifikasi asumsi epistemologis dan nilai-nilai yang mendasari masing-masing model secara tepat tanpa	Bentuk Penilaian Tes/Unjuk Kerja: Kuis konsep (15 menit): diberikan deskripsi singkat satu gejala pemerintahan; mahasiswa mengidentifikasi model mana yang paling tepat digunakan untuk menganalisisnya dan menjelaskan alasannya dalam 3-5 kalimat; dinilai berdasarkan ketepatan identifikasi	BP — Mekanisme kuliah: Dosen memfasilitasi debat terstruktur (fishbowl discussion): dua kelompok berargumentasi tentang relevansi dua model yang berbeda untuk satu kasus pemerintahan yang sama, sementara kelompok lain berperan sebagai pengamat yang mencatat kekuatan dan kelemahan argumen; dosen menutup dengan sintesis komparatif (tatap muka di kelas). Mekanisme & materi: Mahasiswa menampilkan tabel komparatif draf di papan tulis atau proyektor	BP — Mekanisme kuliah: Dosen mengunggah materi ringkas (slide atau infografis perbandingan) empat model tata kelola dan menyiapkan skenario kasus singkat tentang gejala pemerintahan kontemporer Indonesia di Google Classroom; dosen membuka forum diskusi asinkron dengan pertanyaan: model mana yang paling menjelaskan kondisi tata kelola daerah yang dipilih mahasiswa dan mengapa (via LMS; sinkron/asinkron). Mekanisme & materi:	Bahan Kajian: • New Public Management (NPM): prinsip efisiensi, orientasi pasar, dan desentralisasi manajemen; • New Public Governance (NPG): jaringan multi-aktor, ko-produksi layanan publik; • New Weberianism: revitalisasi kapasitas negara dan birokrasi profesional; • Collaborative Governance: tata kelola	7

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bantuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (<i>offline</i>)	Daring (<i>online</i>)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		mencampur-adukkan antar-model - Menilai kesesuaian tiap model sebagai alat analisis untuk gejala pemerintahan kontemporer yang spesifik di Indonesia dengan menyertakan argumen berbasis ciri konteks lokal - Memilih dan mempertahankan satu model yang paling relevan untuk menganalisis satu gejala tata kelola yang nyata, disertai justifikasi yang logis dan berbasis konsep	model, konsistensi argumen, dan kejelasan keterkaitan antara ciri model dengan gejala yang dianalisis Partisipasi kelas & laboratorium: Kontribusi dalam debat kelas tentang relevansi model-model bagi konteks Indonesia: dinilai dari keberanian mengajukan posisi yang berbeda dari mayoritas dengan dukungan argumen konseptual (Creativity), kualitas menyanggah secara konstruktif, dan kemampuan mensintesis	sebagai bahan perdebatan; setelah debat, tiap mahasiswa menyempurnakan tabel komparatifnya berdasarkan argumen yang muncul selama sesi MP — Metode Pembelajaran: Case-Based Learning dengan variasi debat terstruktur: kelompok-kelompok memerankan perspektif model yang berbeda dalam menganalisis kasus yang sama, mendorong mahasiswa memahami implikasi praktis tiap model bagi desain kebijakan dan kelembagaan pemerintahan Estimasi Waktu: PB 3×50' · PT 3×60' · KM 3×60'. Tugas: Mahasiswa menyusun secara individual sebuah	Mahasiswa membaca materi perbandingan model, mengisi draf tabel komparatif secara mandiri, dan merespons forum diskusi dengan memilih serta mempertahankan satu model menggunakan argumen berbasis teks bacaan wajib sebelum sesi luring berlangsung MP — Metode Pembelajaran: Case-Based Learning: mahasiswa menganalisis satu gejala tata kelola pemerintahan yang diberikan dosen (misalnya: privatisasi layanan air minum di suatu daerah, atau program kolaborasi pemerintah-masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam) dan menentukan lensa model mana yang paling tajam untuk membedah gejala	kolaboratif lintas sektor; Relevansi komparatif model-model sebagai alat analisis gejala pemerintahan di Indonesia; Pustaka: Stoker (1998); Osborne dan Gaebler (1992); Pollitt dan Bouckaert (2011); Sedarmayanti (2012).	

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (<i>offline</i>)	Daring (<i>online</i>)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			perspektif yang beragam Tugas: Tabel komparatif individual empat model tata kelola dengan minimal empat dimensi pembandingan (misalnya: asumsi tentang peran negara, mekanisme koordinasi, nilai utama, contoh kebijakan di Indonesia), serta paragraf analisis 150-200 kata yang memilih satu model paling relevan untuk konteks pemerintahan di salah satu provinsi Kawasan Timur Indonesia	tabel komparatif empat model tata kelola pemerintahan (NPM, NPG, New Weberianism, Collaborative Governance) dengan minimal empat dimensi pembandingan yang dipilih secara mandiri dan relevan, dilengkapi dengan satu paragraf analisis yang memilih model paling relevan untuk menganalisis satu gejala tata kelola spesifik di salah satu provinsi Kawasan Timur Indonesia; pemilihan model harus dijustifikasi berdasarkan kesesuaian asumsi model dengan karakteristik konteks daerah yang dipilih Deliverable: Tabel komparatif (format tabel dalam dokumen Word atau PDF, minimal empat baris model dan empat kolom dimensi) ditambah paragraf analisis 150-200 kata; dikumpulkan melalui SISTER/IAKAD UNISAN paling lambat	tersebut Estimasi Waktu: PB 3×50' · PT 3×60' · KM 3×60'.		

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (<i>offline</i>)	Daring (<i>online</i>)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				tiga hari setelah sesi tatap muka; bila menggunakan AI Generatif, wajib menyertakan lampiran prompt dan deklarasi penggunaan			
4,5	Sub-CPMK3: Menguraikan arsitektur kelembagaan dan hukum tata pemerintahan Indonesia — mencakup pembagian kewenangan eksekutif-legislatif-yudikatif serta kerangka regulasi penyelenggaraan pemerintahan — dengan memetakan keterkaitan antarlembaga dalam bagan kelembagaan.	Mahasiswa mampu: • Menguraikan pembagian kewenangan antara lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif dalam sistem pemerintahan Indonesia sesuai dengan kerangka konstitusional yang berlaku • Memetakan keterkaitan antarlembaga negara tingkat pusat dalam sebuah bagan kelembagaan yang menggambarkan alur kewenangan, fungsi pengawasan, dan hubungan koordinasi	Bentuk Penilaian Tes/Unjuk Kerja: Tidak ada tes formal di minggu ini; penilaian utama melalui kualitas bagan kelembagaan dan analisis tertulis Partisipasi kelas & laboratorium: Kontribusi dalam sesi pemetaan bersama di papan tulis: dinilai dari ketepatan menempatkan lembaga pada posisi yang sesuai, kemampuan	BP — Mekanisme kuliah: Dosen membuka sesi dengan kasus konkret tumpang tindih kewenangan antar-lembaga yang aktual, meminta beberapa kelompok menampilkan draf bagan mereka dan menunjukkan di mana letak permasalahan tersebut dalam arsitektur kelembagaan; dosen memberikan koreksi dan pengayaan tentang kerangka regulasi yang relevan (tatap muka di kelas). Mekanisme & materi: Kelompok kecil mempresentasikan bagan kelembagaan draf mereka	BP — Mekanisme kuliah: Dosen menyediakan materi diagram dasar arsitektur kelembagaan negara (template bagan kosong yang harus dilengkapi mahasiswa) dan tautan ke dokumen regulasi kunci yang dapat diakses daring; dosen merekam video singkat (10-15 menit) yang menjelaskan prinsip pembagian kewenangan dan hierarki peraturan perundang-undangan (via LMS; sinkron/asinkron). Mekanisme & materi: Mahasiswa mengunduh template bagan, melengkapinya secara mandiri menggunakan	Bahan Kajian: • Arsitektur kelembagaan negara Indonesia: eksekutif, legislatif, yudikatif, dan lembaga negara independen; • Pembagian dan distribusi kewenangan antarlembaga dalam sistem presidensial Indonesia; • Hierarki peraturan perundang-undangan dan kerangka regulasi penyelenggaraan pemerintahan; • Potensi konflik kewenangan dan mekanisme penyelesaiannya dalam	13

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (<i>offline</i>)	Daring (<i>online</i>)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		secara akurat • Mengidentifikasi kerangka regulasi utama yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan menjelaskan hierarki peraturan perundang-undangan yang relevan • Menganalisis satu permasalahan tata kelola kelembagaan aktual (misalnya tumpang tindih kewenangan atau konflik regulasi antar-lembaga) menggunakan bagan kelembagaan yang telah disusun sebagai alat analisis	mengidentifikasi hubungan antar-lembaga yang belum terpetakan, dan semangat kolaborasi dalam mengoreksi atau melengkapi peta kelompok lain (Harmony); mahasiswa didorong merefleksikan hubungan antara arsitektur kelembagaan yang kuat dengan kedaulatan nasional (Nationalism) Tugas: Bagan kelembagaan negara Indonesia (format visual, dapat dibuat dengan Miro, Lucidchart, atau PowerPoint) yang memuat minimal	dan mengidentifikasi titik konflik kewenangan; kelas berdiskusi untuk menyepakati peta kelembagaan yang akurat; tiap mahasiswa kemudian menyempurnakan bagan individual berdasarkan masukan diskusi kelas MP — Metode Pembelajaran: Project-Based Learning dengan analisis kasus: mahasiswa menggunakan bagan kelembagaan yang sedang mereka bangun sebagai alat kerja nyata untuk menganalisis kasus tumpang tindih kewenangan, mempraktikkan penggunaan kerangka analitis kelembagaan yang akan menjadi fondasi bagi topik relasi pusat-daerah pada minggu-minggu berikutnya	Miro atau Lucidchart berdasarkan materi yang disediakan dan regulasi yang diakses, kemudian mengunggah versi draf untuk mendapat umpan balik sesama mahasiswa melalui forum Google Classroom sebelum sesi luring MP — Metode Pembelajaran: Project-Based Learning: mahasiswa membangun artefak bagan kelembagaan secara bertahap, dimulai dari pengisian mandiri daring sebagai draf awal yang akan disempurnakan pada sesi luring berdasarkan diskusi dan verifikasi bersama Estimasi Waktu: PB 3×50' · PT 3×60' · KM 3×60'.	sistem kelembagaan; Pustaka: Sedarmayanti (2012); Prasetyo dan Hoessein (2002); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Pollitt dan Bouckaert (2011).	

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bantuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (<i>offline</i>)	Daring (<i>online</i>)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			10 lembaga negara utama beserta alur kewenangan dan relasi pengawasannya, dilengkapi catatan analisis tertulis 200-300 kata tentang satu titik potensi konflik atau tumpang tindih kewenangan yang teridentifikasi	Estimasi Waktu: PB 3×50' · PT 3×60' · KM 3×60'. Tugas: Mahasiswa menyusun secara individual sebuah bagan kelembagaan negara Indonesia yang komprehensif dan memuat minimal 10 lembaga negara utama (eksekutif, legislatif, yudikatif, dan lembaga negara independen yang relevan) dengan keterangan alur kewenangan, fungsi pengawasan, dan relasi koordinasi antar-lembaga; bagan dilengkapi dengan catatan analisis tertulis yang mengidentifikasi satu titik potensi konflik atau tumpang tindih kewenangan beserta dasar regulasi yang menjadi sumbernya dan implikasinya terhadap efektivitas penyelenggaraan pemerintahan			

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (<i>offline</i>)	Daring (<i>online</i>)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Deliverable: Bagan kelembagaan dalam format visual digital (Miro, Lucidchart, atau file PowerPoint/PDF) yang dapat dibaca dengan jelas, disertai catatan analisis tertulis 200-300 kata dalam dokumen terpisah atau sebagai anotasi pada bagan; dikumpulkan melalui SISTER/SIAKAD UNISAN paling lambat sebelum sesi pertemuan minggu berikutnya; bila menggunakan AI Generatif, wajib menyertakan lampiran prompt dan deklarasi penggunaan			
			Bentuk Penilaian Tes/Unjuk Kerja: Kuis tertulis singkat (15 menit) menguji kemampuan mahasiswa mengidentifikasi dan membedakan	BP — Mekanisme kuliah: Dosen membuka sesi dengan revidi singkat (10 menit) atas pertanyaan umum dari forum daring, lalu memfasilitasi presentasi dan diskusi kritis bagan kelembagaan antarkelompok menggunakan LCD	BP — Mekanisme kuliah: Dosen mengunggah video mini-lecture (20-25 menit) bertopik arsitektur kelembagaan negara dan hukum tata pemerintahan ke SISTER/SIAKAD UNISAN, dilengkapi slide anotasi yang dapat	Bahan Kajian: • Arsitektur kelembagaan negara Indonesia: eksekutif, legislatif, yudikatif, dan lembaga independen; • Pembagian kewenangan: atribusi, delegasi, dan mandat	

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bantuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (<i>offline</i>)	Daring (<i>online</i>)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			kewenangan atribusi, delegasi, dan mandat serta mencocokkan lembaga negara dengan fungsi konstitusionalnya; kriteria: ketepatan konsep dan kelengkapan identifikasi minimal 80% poin benar Partisipasi kelas & laboratorium: Keaktifan dalam sesi diskusi analisis bagan kelembagaan: mahasiswa menyampaikan argumen berbasis regulasi, merespons pertanyaan peers secara konstruktif, dan menunjukkan integritas akademik dengan tidak	proyektor; dosen memberikan umpan balik langsung berbasis rubrik pada tiap bagan yang dipresentasikan (tatap muka di kelas). Mekanisme & materi: Tiap kelompok mempresentasikan bagan kelembagaan (5-7 menit per kelompok), menerima tanggapan peers, lalu merevisi bagan secara langsung di whiteboard atau pada perangkat masing-masing berdasarkan masukan yang diterima MP — Metode Pembelajaran: Case-Based Learning: kelompok menelaah satu kasus konkret tumpang tindih kewenangan antarlembaga di Indonesia, menandai titik konflik pada bagan kelembagaan yang telah dibuat, dan	diunduh mahasiswa; dosen membuka sesi tanya jawab asinkron via forum diskusi selama 48 jam (via LMS; sinkron/asinkron). Mekanisme & materi: Mahasiswa menonton video mini-lecture, membaca bahan bacaan yang ditautkan, lalu secara mandiri menyusun draf awal bagan kelembagaan menggunakan Miro atau Lucidchart versi gratis sebelum sesi luring MP — Metode Pembelajaran: Case-Based Learning: mahasiswa menganalisis kasus nyata tumpang tindih kewenangan antarlembaga (contoh: sengketa kewenangan antara pusat dan daerah yang pernah dilaporkan media nasional) dan	dalam hukum tata pemerintahan; • Kerangka regulasi penyelenggaraan pemerintahan dan mekanisme checks and balances; • Potensi tumpang tindih kewenangan antarlembaga dan implikasinya terhadap good governance; Pustaka: Sedarmayanti (2012); Agere (2000); Stoker (1998); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.	

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (<i>offline</i>)	Daring (<i>online</i>)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			mendominasi atau mendistorsi informasi Tugas: Bagan kelembagaan negara Indonesia yang dibuat secara kelompok (2-3 orang) menggunakan Miro atau Lucidchart, memuat minimal 10 lembaga negara, alur kewenangan, dan anotasi singkat per lembaga (maks. 15 kata per anotasi), disertai lembar narasi penjelasan maksimal 1 halaman A4	merumuskan rekomendasi regulatif singkat yang dipaparkan di depan kelas Estimasi Waktu: PB 3×50' · PT 3×60' · KM 3×60'. Tugas: Secara berkelompok (2-3 orang), mahasiswa merancang bagan kelembagaan negara Indonesia yang komprehensif menggunakan Miro atau Lucidchart, memuat struktur eksekutif-legislatif-yudikatif beserta lembaga negara independen, alur kewenangan (atribusi, delegasi, mandat), dan mekanisme checks and balances. Bagan dilengkapi narasi singkat yang mengidentifikasi satu potensi tumpang tindih kewenangan nyata dan implikasinya terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Penggunaan AI Generatif	mendiskusikan penyebab serta solusi regulatif secara daring melalui forum SISTER/SIKAD Estimasi Waktu: PB 3×50' · PT 3×60' · KM 3×60'.		

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (<i>offline</i>)	Daring (<i>online</i>)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				wajib dideklarasikan (mencantumkan prompt dan pernyataan bahwa analisis merupakan hasil mandiri mahasiswa) sesuai Pedoman Penggunaan AI Generatif Secara Etis UNISAN Deliverable: File bagan kelembagaan (format PNG atau PDF dari Miro/Lucidchart) dan lembar narasi analisis maksimal 1 halaman A4 (font Times New Roman 12pt, spasi 1,5), diunggah ke SISTER/SIKAD UNISAN paling lambat H-1 sebelum pertemuan minggu ke-6; cetak fisik dikumpulkan di awal pertemuan luring minggu ke-6			
6,7	Sub-CPMK4: Menganalisis relasi pusat–daerah, otonomi daerah, dan tata kelola pemerintahan desa dengan menguraikan keterkaitan antara regulasi desentralisasi,	Mahasiswa mampu: Menganalisis landasan regulasi desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia serta	Bentuk Penilaian Tes/Unjuk Kerja: Tidak ada tes tersendiri minggu ini; penilaian	BP — Mekanisme kuliah: Dosen membuka dengan pengantar konseptual (15 menit) tentang model desentralisasi administratif, fiskal, dan	BP — Mekanisme kuliah: Dosen mengunggah materi video (20 menit) tentang kerangka regulasi desentralisasi, otonomi daerah, dan tata	Bahan Kajian: Konsep dan model desentralisasi: administratif, fiskal, dan politik;	13

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bantuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (offline)	Daring (online)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	kewenangan, dan praktik nyata tata kelola di Kawasan Timur Indonesia melalui studi kasus kabupaten/kota terpilih.	implikasinya terhadap pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah • Menguraikan mekanisme tata kelola pemerintahan desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, termasuk kewenangan, struktur, dan sumber pendanaan desa • Mengidentifikasi pola relasi pusat-daerah dalam satu studi kasus kabupaten/kota di Kawasan Timur Indonesia berdasarkan data dan regulasi yang relevan • Membedakan model desentralisasi administratif, fiskal, dan politik serta menunjukkan keterkaitan masing-	kognitif terintegrasi dalam laporan studi kasus kelompok yang menuntut analisis regulasi dan fakta lapangan secara terstruktur dengan argumen berbasis bukti Partisipasi kelas & laboratorium: Keaktifan dalam diskusi studi kasus: mahasiswa menyampaikan argumen yang didasarkan pada regulasi dan data spesifik, merespons perbedaan pendapat secara harmonis, dan menunjukkan kepedulian (nilai Service) terhadap kondisi masyarakat	politik, dilanjutkan fasilitasi presentasi studi kasus antarkelompok; dosen memandu diskusi pleno yang memperbandingkan temuan tiap kelompok untuk membangun pemahaman kolektif tentang variasi otonomi di Kawasan Timur Indonesia (tatap muka di kelas). Mekanisme & materi: Tiap kelompok memaparkan temuan awal studi kasus (7-10 menit) menggunakan slide atau matriks analisis, menerima tanggapan kritis dari peers dan dosen, lalu mencatat masukan untuk penyempurnaan laporan akhir MP — Metode Pembelajaran: Case-Based Learning: kelompok menelaah secara mendalam satu kasus nyata	kelola desa ke SISTER/SIKAD UNISAN; dosen menyediakan lembar panduan studi kasus berisi pertanyaan pemandu analisis untuk kabupaten/kota Kawasan Timur Indonesia yang dipilih kelompok (via LMS; sinkron/asinkron). Mekanisme & materi: Mahasiswa menonton video materi, mengakses dokumen regulasi (UU No. 23/2014, UU No. 9/2015, UU No. 6/2014) melalui tautan yang disediakan, lalu mulai mengidentifikasi sumber data studi kasus daerah pilihan kelompok secara daring MP — Metode Pembelajaran: Case-Based Learning: kelompok memilih satu kabupaten/kota di	• Kerangka regulasi otonomi daerah: Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan perubahannya; • Tata kelola pemerintahan desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; • Relasi pusat-daerah dan pembagian kewenangan di Kawasan Timur Indonesia; • Kapasitas kelembagaan pemerintah daerah dan tantangan implementasi otonomi; Pustaka: Prasetyo dan Hoessein (2002); Sedarmayanti (2012); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Stoker (1998).	

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bantuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (<i>offline</i>)	Daring (<i>online</i>)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		masing model dengan praktik otonomi di Kawasan Timur Indonesia • Mengevaluasi kesesuaian antara kewenangan yang diamanatkan regulasi dengan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah di Kawasan Timur Indonesia berdasarkan studi kasus	daerah yang dikaji Tugas: Laporan studi kasus kelompok (3-4 orang) menganalisis relasi pusat-daerah dan praktik otonomi di satu kabupaten/kota Kawasan Timur Indonesia, maksimal 4 halaman A4 tidak termasuk lampiran, disertai matriks analisis regulasi versus praktik nyata	ketidaksesuaian antara kewenangan yang diamanatkan regulasi dan kapasitas kelembagaan daerah di Kawasan Timur Indonesia, mengidentifikasi akar masalah, dan merumuskan rekomendasi berbasis regulasi yang dipaparkan kepada kelas Estimasi Waktu: PB 3×50' · PT 3×60' · KM 3×60'. Tugas: Secara berkelompok (3-4 orang), mahasiswa melakukan studi kasus terhadap satu kabupaten/kota di Kawasan Timur Indonesia untuk menganalisis praktik relasi pusat-daerah dan otonomi. Laporan wajib memuat: (1) profil singkat daerah dan dasar regulasi otonominya, (2) matriks analisis yang membandingkan kewenangan menurut UU No. 23/2014 dengan	Kawasan Timur Indonesia dan secara daring mengumpulkan data (regulasi daerah, laporan kinerja, atau berita kebijakan yang dapat diakses publik) sebagai bahan analisis sebelum sesi luring Estimasi Waktu: PB 3×50' · PT 3×60' · KM 3×60'.		

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (<i>offline</i>)	Daring (<i>online</i>)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				praktik nyata di lapangan, (3) identifikasi hambatan pelaksanaan otonomi (kapasitas kelembagaan, fiskal, atau SDM), dan (4) rekomendasi perbaikan tata kelola. Sumber data dapat berupa regulasi daerah, laporan LPPD, atau dokumen publik lainnya yang dapat diakses daring. Penggunaan AI Generatif wajib dideklarasikan sesuai Pedoman Penggunaan AI Generatif Secara Etis UNISAN Deliverable: Laporan studi kasus maksimal 4 halaman A4 (font Times New Roman 12pt, spasi 1,5, tidak termasuk lampiran) beserta matriks analisis regulasi versus praktik dalam format tabel, diunggah ke SISTER/IAKAD UNISAN paling lambat H-1 sebelum pertemuan minggu ke-7; cetak fisik dikumpulkan di awal			

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bantuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (offline)	Daring (online)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				pertemuan luring minggu ke-7			
			Bentuk Penilaian Tes/Unjuk Kerja: Tidak ada tes tersendiri minggu ini; penilaian kognitif terintegrasi dalam presentasi dan laporan akhir evaluasi yang menuntut kemampuan mengevaluasi (C5) dan merumuskan rekomendasi berbasis bukti regulatif dan data lapangan Partisipasi kelas & laboratorium: Keaktifan dalam sesi presentasi dan tanya jawab antarkelompok:	BP — Mekanisme kuliah: Dosen memfasilitasi sesi presentasi evaluasi studi kasus tiap kelompok (10-12 menit presentasi, 5-7 menit tanya jawab); dosen merangkum pola temuan lintas kelompok di whiteboard, menunjukkan variasi dan kesamaan permasalahan tata kelola di berbagai daerah Kawasan Timur Indonesia, dan memberikan penguatan konseptual sebelum sesi UTS (tatap muka di kelas). Mekanisme & materi: Tiap kelompok mempresentasikan laporan evaluasi mencakup peta permasalahan dan matriks rekomendasi kebijakan; peers memberikan tanggapan terstruktur menggunakan lembar umpan balik yang	BP — Mekanisme kuliah: Dosen mengunggah rubrik penilaian presentasi dan laporan evaluasi ke SISTER/IAKAD UNISAN, disertai panduan penyusunan peta permasalahan (problem mapping) dan matriks rekomendasi kebijakan; dosen membuka konsultasi daring via forum SISTER/IAKAD untuk kelompok yang memerlukan bimbingan sebelum presentasi (via LMS; sinkron/asinkron). Mekanisme & materi: Mahasiswa menyempurnakan laporan studi kasus berdasarkan masukan minggu ke-6, menyusun peta permasalahan	Bahan Kajian: - Evaluasi kinerja tata kelola daerah berbasis indikator good governance: akuntabilitas, transparansi, partisipasi, rule of law; - Tata kelola pemerintahan desa: pengelolaan Dana Desa, musyawarah desa, dan pelaporan realisasi; - Pemetaan permasalahan tata kelola daerah di Kawasan Timur Indonesia: akar masalah, aktor, dan dampak; - Penyusunan rekomendasi kebijakan tata kelola yang realistis dan adaptif terhadap kapasitas daerah;	

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bantuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (<i>offline</i>)	Daring (<i>online</i>)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			mahasiswa memberikan tanggapan yang konstruktif dan berbasis argumen regulasi, menunjukkan nilai Harmony dalam kolaborasi lintas kelompok, serta nilai Service melalui kepedulian terhadap kebutuhan masyarakat daerah yang dikaji Tugas: Laporan evaluasi akhir kelompok yang menyempurnakan laporan minggu ke-6 berdasarkan masukan, ditambahkan peta permasalahan dan matriks rekomendasi kebijakan;	disediakan dosen; kelompok mencatat masukan untuk penyempurnaan laporan akhir yang dikumpulkan MP — Metode Pembelajaran: Project-Based Learning: kelompok mempresentasikan produk evaluasi tata kelola daerah yang bersifat solutif dan berbasis bukti, memperlihatkan kemampuan berpikir kritis, nilai Nationalism dalam memperkuat otonomi daerah, dan nilai Adaptability dalam merumuskan rekomendasi yang sesuai dengan keterbatasan kapasitas daerah Estimasi Waktu: PB 3×50' · PT 3×60' · KM 3×60'. Tugas: Kelompok menyempurnakan laporan	menggunakan Miro atau Lucidchart, dan menyiapkan slide presentasi evaluasi menggunakan Google Slides atau Microsoft PowerPoint secara kolaboratif MP — Metode Pembelajaran: Project-Based Learning: kelompok menyempurnakan produk studi kasus menjadi laporan evaluasi komprehensif yang dapat difungsikan sebagai bahan rekomendasi kebijakan, dengan integrasi data regulasi, temuan lapangan, dan peta permasalahan tata kelola daerah Estimasi Waktu: PB 3×50' · PT 3×60' · KM 3×60'.	Pustaka: Prasetyo dan Hoessein (2002); Sedarmayanti (2012); Agere (2000); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Komisi Pemberantasan Korupsi (2023); Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (2023).	

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (<i>offline</i>)	Daring (<i>online</i>)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			panjang maksimal 6 halaman A4 tidak termasuk lampiran dan referensi	studi kasus dari minggu ke-6 menjadi laporan evaluasi tata kelola daerah yang komprehensif. Laporan akhir wajib memuat tambahan: (1) evaluasi praktik tata kelola menggunakan minimal tiga indikator good governance (akuntabilitas, transparansi, partisipasi) yang dikaitkan dengan data dan regulasi spesifik, (2) peta permasalahan tata kelola (dibuat di Miro atau Lucidchart) yang menggambarkan akar masalah, aktor, dan dampak terhadap layanan publik, serta (3) matriks rekomendasi kebijakan yang memuat masalah, rekomendasi, dasar regulasi, dan indikator keberhasilan. Laporan ini sekaligus menjadi bahan persiapan UTS. Penggunaan AI Generatif wajib dideklarasikan sesuai Pedoman Penggunaan AI Generatif			

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (<i>offline</i>)	Daring (<i>online</i>)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Secara Etis UNISAN Deliverable: Laporan evaluasi akhir maksimal 6 halaman A4 (font Times New Roman 12pt, spasi 1,5, tidak termasuk lampiran dan referensi), file peta permasalahan (PNG atau PDF dari Miro/Lucidchart), dan file slide presentasi (maksimal 12 slide), ketiganya diunggah ke SISTER/SIKAD UNISAN paling lambat akhir hari pertemuan minggu ke-7; cetak fisik laporan dan peta permasalahan dikumpulkan langsung kepada dosen			
8		Mahasiswa mampu: Menjelaskan konsep dan prinsip good governance serta mengidentifikasi penerapannya dalam konteks pemerintahan	Bentuk Penilaian Tes/Unjuk Kerja: Ujian Tengah Semester tertulis mencakup materi minggu 1-7; bentuk soal terdiri	BP — Mekanisme kuliah: Dosen membuka sesi dengan penjelasan teknis dan tata tertib UTS (10 menit), membagikan lembar soal, dan mengawasi pelaksanaan ujian sesuai durasi yang	BP — Mekanisme kuliah: Dosen mengunggah pengumuman teknis pelaksanaan UTS (waktu, ruang, materi cakupan, tata tertib) ke SISTER/SIKAD UNISAN; dosen	Bahan Kajian: - Review terintegrasi: konsep dan prinsip good governance (minggu 1-2); - Review terintegrasi: pilar akuntabilitas,	—

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bantuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (<i>offline</i>)	Daring (<i>online</i>)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Indonesia secara akurat • Menguraikan arsitektur kelembagaan negara dan kerangka hukum tata pemerintahan, termasuk pembagian kewenangan antarlembaga • Menganalisis relasi pusat-daerah, otonomi daerah, dan tata kelola desa berdasarkan regulasi yang berlaku dan studi kasus yang telah dikerjakan • Mengevaluasi praktik tata kelola pemerintahan daerah menggunakan indikator good governance yang relevan • Menyusun argumen tertulis yang koheren, berbasis bukti regulasi dan konsep teoritis yang dipelajari pada minggu 1-7	atas pertanyaan esai analitis (bukan pilihan ganda) yang menuntut kemampuan menguraikan, menganalisis, dan mengevaluasi (C2-C5); kriteria penilaian: ketepatan konsep, kedalaman analisis, penggunaan regulasi yang relevan sebagai dasar argumen, dan sistematika penulisan; tidak ada kunci jawaban yang dituliskan di sini Partisipasi kelas & laboratorium: Tidak berlaku pada sesi UTS; mahasiswa diharapkan menunjukkan	ditetapkan; dosen menutup sesi dengan informasi jadwal pengumuman nilai dan agenda perkuliahan pascaUTS (tatap muka di kelas). Mekanisme & materi: Mahasiswa mengerjakan soal UTS secara mandiri dan jujur dalam batas waktu yang ditentukan; lembar jawaban dikumpulkan langsung kepada dosen di akhir sesi MP — Metode Pembelajaran: Ujian tertulis individual: mahasiswa mendemonstrasikan penguasaan kognitif C2-C5 atas materi minggu 1-7 melalui esai analitis yang mengintegrasikan konsep good governance, arsitektur kelembagaan, dan analisis otonomi daerah dalam argumen	menyediakan kisi-kisi umum (bukan soal) yang memetakan topik dan level kognitif yang diujikan per pokok bahasan minggu 1-7 (via LMS; sinkron/asinkron). Mekanisme & materi: Mahasiswa melakukan review mandiri dengan mengkaji ulang seluruh materi minggu 1-7, termasuk video mini-lecture, laporan studi kasus, dan bagan kelembagaan yang telah dikerjakan; diskusi antarmahasiswa difasilitasi melalui forum SISTER/SIKAD MP — Metode Pembelajaran: Review mandiri berbasis portofolio tugas: mahasiswa menggunakan hasil tugas individu dan kelompok (bagan kelembagaan, laporan	transparansi, partisipasi, dan rule of law (minggu 3-4); • Review terintegrasi: arsitektur kelembagaan dan hukum tata pemerintahan (minggu 5); • Review terintegrasi: relasi pusat-daerah, otonomi daerah, dan tata kelola desa (minggu 6-7); Pustaka: Stoker (1998); Agere (2000); Sedarmayanti (2012); Prasetyo dan Hoessein (2002); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.	

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (<i>offline</i>)	Daring (<i>online</i>)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			integritas akademik penuh selama pelaksanaan ujian sesuai tata tertib UNISAN Tugas: Tidak ada tugas tambahan pada minggu UTS; mahasiswa menyiapkan diri dengan mengkaji kembali laporan studi kasus dan bagan kelembagaan yang telah dikerjakan sebagai bahan review mandiri	yang terstruktur Estimasi Waktu: PB 3×50' · PT 3×60' · KM 3×60'. Tugas: Tidak ada penugasan baru pada minggu UTS. Mahasiswa dianjurkan melakukan review terstruktur secara mandiri dengan menyiapkan catatan ringkas (tidak dikumpulkan) yang merangkum pokok-pokok materi minggu 1-7 sebagai persiapan ujian Deliverable: Lembar jawaban UTS tertulis dikumpulkan langsung kepada dosen di akhir sesi ujian luring; tidak ada deliverable daring pada minggu ini	studi kasus, peta permasalahan) sebagai bahan konsolidasi pemahaman sebelum ujian, sesuai prinsip pembelajaran reflektif SN-Dikti Pasal 14 Estimasi Waktu: PB 3×50' · PT 3×60' · KM 3×60'.		
9,10	Sub-CPMK5: Menerapkan fungsi perencanaan dan pengorganisasian pemerintahan dengan menyusun dokumen Rencana Kerja (Renja)	Mahasiswa mampu: • Merinci komponen dokumen Rencana Kerja (Renja) unit pemerintahan daerah	Bentuk Penilaian Tes/Unjuk Kerja: Kuis singkat tertulis (10 soal	BP — Mekanisme kuliah: Dosen memaparkan kerangka perencanaan berbasis kinerja menggunakan LCD	BP — Mekanisme kuliah: Dosen menyampaikan kuliah interaktif melalui platform video conference dengan	Bahan Kajian: • Fungsi perencanaan dalam manajemen pemerintahan: konsep	13

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (offline)	Daring (online)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	fiktif unit pemerintahan daerah yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, program, dan indikator kinerja terukur secara akuntabel.	sesuai kerangka perencanaan berbasis kinerja (visi, misi, tujuan, sasaran, program, indikator kinerja) - Merumuskan visi dan misi unit pemerintahan daerah fiktif yang selaras dengan prinsip good governance dan kebutuhan konteks Kawasan Timur Indonesia - Menyusun sasaran program dengan indikator kinerja terukur (SMART) yang dapat diverifikasi dan bersifat akuntabel - Mengidentifikasi struktur pengorganisasian unit pemerintahan fiktif beserta kewenangan dan fungsi tiap unit kerja sesuai prinsip rule of law	pilihan ganda dan isian pendek) mengukur pemahaman komponen Renja dan prinsip perencanaan berbasis kinerja; kriteria: ketepatan identifikasi komponen, kelengkapan elemen SMART pada indikator kinerja, dan keselarasan sasaran dengan tujuan organisasi Partisipasi kelas & laboratorium: Keaktifan dalam diskusi kelompok perumusan visi-misi unit fiktif: frekuensi kontribusi, relevansi argumentasi dengan konsep perencanaan	proyektor dan whiteboard untuk memetakan hubungan antara visi, misi, tujuan, sasaran, program, dan indikator kinerja; memfasilitasi workshop kelompok penyusunan komponen Renja fiktif dengan lembar kerja terstruktur (tatap muka di kelas). Mekanisme & materi: Mahasiswa dalam kelompok (4-5 orang) mengisi lembar kerja Renja fiktif secara manual di papan whiteboard kelompok masing-masing, kemudian mempresentasikan draft visi-misi ke kelompok lain untuk mendapat umpan balik konstruktif; mahasiswa merevisi dan memindahkan hasil ke Google Docs sebagai dokumen kerja bersama	materi struktur Renja pemerintahan daerah berbasis kinerja, disertai contoh dokumen Renja daerah riil dari Kawasan Timur Indonesia sebagai anchor case; dosen memfasilitasi sesi tanya-jawab dan breakout room untuk diskusi kelompok perumusan visi-misi unit fiktif (via LMS; sinkron/asinkron). Mekanisme & materi: Mahasiswa membaca bahan ajar dan regulasi terkait perencanaan daerah yang diunggah di SISTER/SIKAD UNISAN sebelum sesi; mengisi lembar pra-kuliah yang mengidentifikasi satu kelemahan perencanaan pada dokumen Renja daerah contoh; berpartisipasi aktif dalam breakout room untuk merumuskan draft visi-	dan siklus; - Komponen dokumen Rencana Kerja (Renja) unit pemerintahan daerah; - Indikator kinerja berbasis SMART dalam perencanaan pemerintahan; - Fungsi pengorganisasian: struktur dan pembagian kewenangan unit pemerintahan; - Keselarasan perencanaan dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi good governance; Pustaka: Osborne dan Gaebler (1992); Sedarmayanti (2012); Pollitt dan Bouckaert (2011); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;	

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bantuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (<i>offline</i>)	Daring (<i>online</i>)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Menjelaskan keterkaitan antara fungsi perencanaan dan pengorganisasian dalam siklus manajemen pemerintahan daerah	pemerintahan, serta sikap menghargai perspektif rekan kelompok (nilai Harmony) Tugas: Draf awal dokumen Renja fiktif yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, dan minimal 3 program beserta indikator kinerja masing-masing; panjang 4-6 halaman A4 format dokumen perencanaan, dikumpulkan melalui SIAKAD UNISAN	MP — Metode Pembelajaran: Project-Based Learning: workshop hands-on penyusunan komponen awal Renja fiktif menggunakan lembar kerja terstruktur, dengan sesi umpan balik antara kelompok (peer critique) yang menekankan kejelasan indikator kinerja dan akuntabilitas sasaran Estimasi Waktu: PB 3×50' · PT 3×60' · KM 3×60'. Tugas: Setiap kelompok menetapkan satu unit pemerintahan daerah fiktif di Kawasan Timur Indonesia (contoh: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten X, Provinsi Sulawesi Tengah) dan menyusun draf awal dokumen Renja yang memuat: (1) gambaran singkat konteks daerah	misi kelompok MP — Metode Pembelajaran: Project-Based Learning: mahasiswa mulai mengerjakan Proyek Renja fiktif secara kolaboratif di Google Docs bersama — sesi ini berfokus pada tahap inisiasi proyek: penetapan konteks daerah fiktif, perumusan visi-misi, dan penentuan tujuan serta sasaran awal Estimasi Waktu: PB 3×50' · PT 3×60' · KM 3×60'.	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (2023).	

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (offline)	Daring (online)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				fiktif, (2) pernyataan visi dan misi unit, (3) minimal 2 tujuan strategis, (4) minimal 4 sasaran terukur dengan indikator SMART, dan (5) minimal 3 program beserta indikator kinerja output dan outcome. Penggunaan Generative AI diperbolehkan sebatas asistensi penstrukturan argumen dengan kewajiban mencantumkan prompt dan deklarasi penggunaan sesuai Pedoman AI Etis UNISAN. Deliverable: Draf Dokumen Renja Fiktif (4-6 halaman A4) dalam format Google Docs atau Microsoft Word, dikumpulkan melalui SIAKAD UNISAN sebelum sesi Minggu 10			
			Bentuk Penilaian Tes/Unjuk Kerja:	BP — Mekanisme kuliah: Dosen memfasilitasi sesi presentasi kelompok (masing-masing 10-12	BP — Mekanisme kuliah: Dosen memberikan umpan balik terstruktur atas draf Renja fiktif	Bahan Kajian: • Penyusunan program dan kegiatan dalam Renja: target output,	

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bantuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (<i>offline</i>)	Daring (<i>online</i>)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			Tidak ada tes tertulis pada minggu ini; penilaian difokuskan pada kualitas dokumen dan presentasi Partisipasi kelas & laboratorium: Keaktifan dalam sesi peer review antara kelompok: kualitas umpan balik yang diberikan (spesifik, konstruktif, berbasis kriteria Renja), sikap kritis namun kolaboratif (nilai Harmony dan Integrity), dan kemampuan merespons masukan secara terbuka Tugas:	menit) atas dokumen Renja fiktif yang telah disempurnakan, diikuti sesi tanya-jawab panel dari kelompok lain; dosen memberikan penilaian menggunakan rubrik yang mencakup kelengkapan komponen, ketajaman indikator kinerja, dan kualitas argumen akuntabilitas (tatap muka di kelas). Mekanisme & materi: Tiap kelompok mempresentasikan Renja fiktif akhirnya menggunakan slide ringkasan (maksimal 10 slide) di hadapan kelas; kelompok pendengar berperan sebagai pemangku kepentingan fiktif (DPRD, Inspektorat, atau masyarakat) yang mengajukan pertanyaan kritis berdasarkan peran yang ditetapkan dosen; mahasiswa mencatat umpan balik untuk revisi	yang dikumpulkan pada Minggu 9 melalui komentar di Google Docs dan sesi video conference; dosen memandu diskusi pendalaman tentang kerangka anggaran indikatif dan mekanisme pertanggungjawaban dalam Renja berbasis regulasi pengelolaan keuangan daerah (via LMS; sinkron/asinkron). Mekanisme & materi: Mahasiswa merevisi draf Renja berdasarkan umpan balik dosen dan rekan, melengkapi kerangka anggaran indikatif dan mekanisme pelaporan; kelompok melakukan peer review silang atas Renja kelompok lain menggunakan rubrik penilaian yang diunggah di SISTER/SIKAD UNISAN, kemudian mendiskusikan hasil	outcome, dan anggaran indikatif; • Mekanisme pertanggungjawaban dan pelaporan dalam dokumen perencanaan pemerintahan; • Matriks RACI dalam pengorganisasian unit pemerintahan daerah; • Prinsip akuntabilitas dan transparansi sebagai landasan dokumen perencanaan yang baik; • Teknik presentasi dokumen perencanaan kepada pemangku kepentingan; Pustaka: Osborne dan Gaebler (1992); Sedarmayanti (2012); Pollitt dan Bouckaert (2011); Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Kementerian	

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bantuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (<i>offline</i>)	Daring (<i>online</i>)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			Dokumen Renja fiktif final yang telah disempurnakan, memuat seluruh komponen lengkap (visi, misi, tujuan, sasaran, program, kegiatan, anggaran indikatif, indikator kinerja, mekanisme pelaporan, dan matriks RACI); panjang 8-12 halaman A4, dilengkapi lembar deklarasi penggunaan AI bila relevan, dikumpulkan melalui SIAKAD UNISAN	akhir MP — Metode Pembelajaran: Project-Based Learning dengan simulasi presentasi publik: kelompok mempresentasikan Renja fiktif dalam skenario rapat koordinasi perencanaan fiktif, di mana kelompok lain memainkan peran pemangku kepentingan yang berbeda untuk melatih akuntabilitas publik dan kemampuan argumentasi Estimasi Waktu: PB 3×50' · PT 3×60' · KM 3×60'. Tugas: Kelompok menyempurnakan Dokumen Renja fiktif dari Minggu 9 menjadi versi final yang lengkap, mencakup: (1) seluruh komponen dari draf awal yang telah direvisi, (2) rincian kegiatan per	review di forum diskusi daring MP — Metode Pembelajaran: Project-Based Learning: tahap pengembangan dan penyempurnaan dokumen Renja fiktif melalui siklus revisi berbasis umpan balik (dosen dan sejawat), dengan teknik peer review terstruktur menggunakan rubrik kriteria Renja Estimasi Waktu: PB 3×50' · PT 3×60' · KM 3×60'.	Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (2023).	

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (<i>offline</i>)	Daring (<i>online</i>)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				program beserta target output kuantitatif, (3) kerangka anggaran indikatif per program (dalam format tabel), (4) mekanisme pelaporan dan pengawasan yang eksplisit (siapa melaporkan apa kepada siapa dan kapan), serta (5) matriks RACI minimal untuk dua program utama. Dokumen diserahkan sebelum sesi presentasi luring, dan slide presentasi (maksimal 10 slide) dikumpulkan bersamaan. Nilai Integrity diwujudkan melalui pelaporan yang akuntabel dan tidak mengandung data fiktif yang menyesatkan. Deliverable: Dokumen Renja Fiktif Final (8-12 halaman A4) beserta file slide presentasi (maksimal 10 slide), keduanya dalam format PDF, dikumpulkan melalui SIAKAD UNISAN			

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (offline)	Daring (online)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
11	Sub-CPMK6: Menerapkan fungsi pengelolaan SDM aparatur, pengelolaan keuangan daerah, dan pengambilan keputusan berbasis data dalam simulasi operasional unit pemerintahan, yang menghasilkan laporan kinerja fiktif terstruktur dengan analisis varians anggaran dan rekomendasi tindak lanjut.	Mahasiswa mampu: • Menerapkan prinsip pengelolaan SDM aparatur (rekrutmen, penempatan, pengembangan kompetensi, dan penilaian kinerja) dalam konteks simulasi operasional unit pemerintahan fiktif yang telah dirancang pada Minggu 9-10 • Menyusun simulasi anggaran operasional sederhana unit pemerintahan fiktif yang mencakup pos belanja pegawai, belanja barang/jasa, dan belanja modal sesuai prinsip pengelolaan keuangan daerah berbasis PP 12/2019 • Menganalisis varians antara anggaran yang direncanakan dan	Bentuk Penilaian Tes/Unjuk Kerja: Studi kasus tertulis individual: mahasiswa diberikan skenario operasional unit pemerintahan fiktif dengan data realisasi anggaran dan kinerja SDM; mahasiswa menganalisis varians dan merumuskan rekomendasi; kriteria penilaian meliputi ketepatan identifikasi varians, kedalaman analisis penyebab, relevansi rekomendasi dengan kondisi kontekstual, serta penggunaan	BP — Mekanisme kuliah: Dosen memfasilitasi simulasi rapat tinjauan kinerja (management review meeting) fiktif di kelas: tiap kelompok berperan sebagai tim manajemen unit pemerintahan yang memaparkan laporan kinerja dan direspons oleh kelompok lain yang berperan sebagai tim pengawas internal (Inspektorat); dosen memberikan umpan balik terstruktur atas kualitas analisis dan rekomendasi (tatap muka di kelas). Mekanisme & materi: Kelompok menyajikan temuan analisis varians dan rekomendasi tindak lanjut di depan kelas menggunakan slide ringkasan (5-7 slide); kelompok pendengar dalam peran Inspektorat	BP — Mekanisme kuliah: Dosen menyampaikan kuliah interaktif melalui video conference tentang manajemen SDM aparatur (sistem merit, penilaian kinerja ASN) dan pengelolaan keuangan daerah berbasis PP 12/2019; dosen memberikan skenario data operasional fiktif (data realisasi anggaran dan kinerja SDM) kepada tiap kelompok melalui SISTER/SIKAD UNISAN untuk dikerjakan dalam simulasi (via LMS; sinkron/asinkron). Mekanisme & materi: Mahasiswa mengunduh dan mempelajari skenario operasional fiktif yang diberikan dosen; kelompok berdiskusi di Google	Bahan Kajian: • Pengelolaan SDM aparatur: sistem merit, penilaian kinerja ASN, dan pengembangan kompetensi; • Pengelolaan keuangan daerah: struktur anggaran, realisasi, dan analisis varians berbasis PP 12/2019; • Pengambilan keputusan berbasis data dalam manajemen pemerintahan; • Penyusunan laporan kinerja pemerintahan: komponen dan standar akuntabilitas; • Fungsi pengawasan internal dan pertanggungjawaban kinerja unit pemerintahan;	7

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (<i>offline</i>)	Daring (<i>online</i>)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		realisasi fiktif yang diberikan, mengidentifikasi penyebab varians secara logis berdasarkan kondisi kontekstual yang ditetapkan • Merumuskan rekomendasi tindak lanjut yang konkret dan terukur berdasarkan hasil analisis varians anggaran dan data kinerja SDM aparatur dalam unit pemerintahan fiktif • Menyusun laporan kinerja fiktif terstruktur yang memuat capaian program, analisis varians anggaran, evaluasi kinerja SDM, dan rekomendasi tindak lanjut secara akuntabel	terminologi pengelolaan keuangan daerah yang tepat Partisipasi kelas & laboratorium: Kontribusi aktif dalam simulasi pengambilan keputusan kelompok: kualitas argumen berbasis data yang diajukan, kemampuan mensintesis perspektif rekan dalam mengambil keputusan operasional fiktif, serta sikap integritas dalam pelaporan (tidak memanipulasi data simulasi untuk menghasilkan laporan yang tampak baik —	fiktif mengajukan pertanyaan tentang akuntabilitas dan kepatuhan terhadap regulasi keuangan daerah; mahasiswa merevisi laporan berdasarkan masukan yang diterima MP — Metode Pembelajaran: Case-Based Learning dengan simulasi rapat tinjauan kinerja: mahasiswa menjalankan skenario pertanggungjawaban kinerja operasional unit pemerintahan fiktif, melatih pengambilan keputusan berbasis data dan komunikasi hasil analisis kepada pemangku kepentingan pengawas Estimasi Waktu: PB 3×50' · PT 3×60' · KM 3×60'. Tugas: Berdasarkan unit pemerintahan fiktif yang	Meet atau breakout room untuk menganalisis data varians anggaran menggunakan Microsoft Excel atau tabel Google Sheets dan mendiskusikan rekomendasi; mahasiswa mengisi lembar analisis varians yang telah disiapkan dosen MP — Metode Pembelajaran: Case-Based Learning: kelompok menganalisis skenario operasional unit pemerintahan fiktif dengan data realisasi yang diberikan dosen, mendiagnosis varians, dan merumuskan keputusan tindak lanjut seolah-olah mereka adalah tim manajemen unit tersebut Estimasi Waktu: PB 3×50' · PT 3×60' · KM 3×60'.	Pustaka: Osborne dan Gaebler (1992); Sedarmayanti (2012); Pollitt dan Bouckaert (2011); Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (2023).	

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (<i>offline</i>)	Daring (<i>online</i>)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			nilai Integrity) Tugas: Laporan Kinerja fiktif terstruktur (6-10 halaman A4) yang memuat: rekapitulasi capaian program, tabel analisis varians anggaran (minimal 3 pos), evaluasi kinerja SDM aparatur, dan minimal 3 rekomendasi tindak lanjut berbasis data; dilengkapi tabel dan grafik pendukung; dikumpulkan melalui SIAKAD UNISAN	telah dirancang pada Minggu 9-10, tiap kelompok mengerjakan simulasi operasional satu triwulan fiktif dengan menggunakan skenario data yang diberikan dosen (data realisasi anggaran dan data kinerja SDM). Kelompok menyusun Laporan Kinerja fiktif yang memuat: (1) ringkasan capaian program dibandingkan target Renja, (2) tabel analisis varians anggaran minimal 3 pos belanja (kolom anggaran, realisasi, varians, dan persentase penyerapan), (3) evaluasi kinerja SDM aparatur berdasarkan data simulasi (minimal 2 indikator kinerja pegawai), (4) identifikasi paling sedikit 2 masalah operasional dari data simulasi, dan (5) minimal 3 rekomendasi tindak lanjut yang spesifik dan terukur. Nilai Integrity ditekankan: data simulasi tidak boleh diubah untuk			

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (offline)	Daring (online)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				memperindah laporan. Penggunaan Microsoft Excel atau Google Sheets untuk pengolahan tabel varians wajib ditunjukkan dalam lampiran. Deliverable: Laporan Kinerja Fiktif Terstruktur (6-10 halaman A4) dalam format PDF beserta file Excel/Sheets pengolahan varians anggaran sebagai lampiran, dikumpulkan melalui SIAKAD UNISAN			
12,13	Sub-CPMK7: Mengevaluasi kualitas tata kelola pemerintahan daerah di Kawasan Timur Indonesia menggunakan instrumen penilaian berbasis indikator good governance melalui telaah dokumen publik (LPPD, LAKIP, laporan audit) dan wawancara/observasi terbatas, serta menghasilkan laporan	Mahasiswa mampu: • Menyusun instrumen penilaian kinerja tata kelola pemerintahan daerah yang operasional dengan menggunakan indikator good governance (akuntabilitas, transparansi, partisipasi, rule of law, efektivitas, dan responsivitas) yang dapat diaplikasikan	Bentuk Penilaian Tes/Unjuk Kerja: Tidak ada tes tertulis pada minggu ini; penilaian difokuskan pada kualitas laporan evaluasi awal dan partisipasi diskusi	BP — Mekanisme kuliah: Dosen memfasilitasi workshop penyusunan matriks gap analysis di kelas: tiap kelompok mempresentasikan temuan telaah dokumen (5-7 menit) dan matriks gap analysis awal menggunakan LCD proyektor, diikuti diskusi kelas yang diarahkan dosen untuk memperdalam analisis kesenjangan dan	BP — Mekanisme kuliah: Dosen memaparkan kerangka evaluasi kinerja tata kelola pemerintahan daerah berbasis indikator good governance melalui video conference, disertai contoh penggunaan instrumen penilaian pada dokumen LPPD dan LAKIP/LKJIP yang tersedia secara daring; dosen memandu diskusi tentang tantangan	Bahan Kajian: • Kerangka evaluasi kinerja tata kelola pemerintahan berbasis indikator good governance; • Telaah dokumen publik pemerintahan daerah: LPPD, LAKIP/LKJIP, dan laporan audit BPK; • Metode gap analysis dalam evaluasi tata	13

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bantuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (offline)	Daring (online)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	evaluasi awal yang memuat temuan dan gap analysis.	pada dokumen publik • Menelaah minimal dua dokumen publik resmi (LPPD, LAKIP/LKJIP, atau laporan audit BPK) dari satu pemerintahan daerah di Kawasan Timur Indonesia untuk mengidentifikasi bukti-bukti pemenuhan indikator good governance • Menganalisis kesenjangan (gap) antara kondisi tata kelola yang tercermin dari dokumen publik dengan standar good governance yang seharusnya dipenuhi berdasarkan kerangka teori yang telah dipelajari • Merumuskan temuan evaluasi awal secara sistematis dalam matriks gap analysis yang memuat aspek	Partisipasi kelas & laboratorium: Kualitas diskusi dalam sesi presentasi evaluasi awal: kemampuan mengajukan argumentasi berbasis dokumen dan data, sikap kritis yang konstruktif terhadap temuan kelompok lain, serta kesadaran terhadap konteks keterbatasan data dan aksesibilitas informasi di Kawasan Timur Indonesia (nilai Adaptability dan Service) Tugas: Laporan Evaluasi Awal Kinerja Tata Kelola (6-10 halaman A4) yang	mengkontekstualisasikan temuan dengan kondisi Kawasan Timur Indonesia (tatap muka di kelas). Mekanisme & materi: Kelompok memaparkan instrumen penilaian dan temuan gap analysis awal; kelas memberikan masukan terstruktur menggunakan lembar umpan balik sejawat yang disiapkan dosen; mahasiswa mencatat masukan untuk penyempurnaan laporan evaluasi awal; dosen menyimpulkan pola kesenjangan tata kelola yang ditemukan lintas kelompok dan mengaitkannya dengan agenda reformasi birokrasi nasional MP — Metode Pembelajaran: Case-Based Learning dengan sesi presentasi dan	aksesibilitas data publik di Kawasan Timur Indonesia dan strategi telaah dokumen yang etis (via LMS; sinkron/asinkron). Mekanisme & materi: Mahasiswa mengakses dan mengunduh dokumen publik resmi (LPPD, LAKIP/LKJIP, atau laporan BPK) pemerintah daerah pilihan kelompok di Kawasan Timur Indonesia melalui portal resmi; mahasiswa menyusun draf instrumen penilaian berbasis indikator good governance menggunakan Google Docs secara kolaboratif, dan mendiskusikan temuan awal telaah dokumen di forum SISTER/SIKAD UNISAN	kelola pemerintahan; • Tantangan tata kelola pemerintahan daerah di Kawasan Timur Indonesia; • Reformasi birokrasi dan standar akuntabilitas kinerja instansi pemerintah; Pustaka: Agere (2000); Stoker (1998); Sedarmayanti (2012); Pollitt dan Bouckaert (2011); Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (2023); Komisi Pemberantasan Korupsi (2023); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.	

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bantuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (<i>offline</i>)	Daring (<i>online</i>)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		yang dievaluasi, kondisi aktual, standar yang diharapkan, kesenjangan yang ditemukan, dan sumber data/bukti • Mengintegrasikan perspektif keberpihakan kepada masyarakat (nilai Service) dalam penilaian kualitas tata kelola dengan menyertakan analisis dampak kesenjangan tata kelola terhadap kualitas layanan publik di Kawasan Timur Indonesia	memuat: instrumen penilaian dengan indikator good governance (minimal 6 indikator, masing-masing dengan sub-indikator terukur), telaah dokumen (ringkasan temuan dari minimal 2 dokumen publik yang dikutip secara tepat), matriks gap analysis (minimal 4 aspek), dan narasi analisis kesenjangan beserta uraian dampak bagi masyarakat; dikumpulkan melalui SIAKAD UNISAN	diskusi panel: kelompok mempertanggungjawabkan instrumen evaluasi dan temuan gap analysis mereka kepada kelas, melatih kemampuan evaluasi kritis berbasis bukti dokumen dan kepekaan terhadap konteks lokal Kawasan Timur Indonesia Estimasi Waktu: PB 3×50' · PT 3×60' · KM 3×60'. Tugas: Tiap kelompok memilih satu pemerintahan daerah di Kawasan Timur Indonesia (provinsi, kabupaten, atau kota) dan melakukan evaluasi awal kinerja tata kelolanya. Langkah kerja: (1) mengembangkan instrumen penilaian dengan minimal 6 indikator good governance beserta sub-indikator terukur dan sumber data yang dapat diverifikasi; (2) mengunduh dan menelaah	MP — Metode Pembelajaran: Case-Based Learning: telaah dokumen publik riil dari pemerintahan daerah di Kawasan Timur Indonesia sebagai kasus nyata, dengan panduan instrumen penilaian yang dikembangkan oleh mahasiswa secara kolaboratif Estimasi Waktu: PB 3×50' · PT 3×60' · KM 3×60'.		

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bantuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (<i>offline</i>)	Daring (<i>online</i>)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				minimal 2 dokumen publik resmi (LPPD tahun terakhir tersedia, LAKIP/LKJIP, atau ringkasan hasil audit BPK); (3) mengisi instrumen penilaian berdasarkan bukti dari dokumen; (4) menyusun matriks gap analysis minimal 4 aspek; (5) menulis narasi analisis kesenjangan yang mengintegrasikan dampak terhadap kualitas layanan publik bagi masyarakat setempat. Telaah difokuskan pada dokumen yang dapat diakses secara daring melalui portal resmi pemerintah daerah, KemenPAN-RB, atau BPK RI. Nilai Service diwujudkan melalui perspektif keberpihakan kepada masyarakat dalam setiap analisis kesenjangan. Sumber dokumen wajib dicantumkan dengan tautan URL dan tanggal			

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bantuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (<i>offline</i>)	Daring (<i>online</i>)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				akses. Deliverable: Laporan Evaluasi Awal Kinerja Tata Kelola (6-10 halaman A4) dalam format PDF yang memuat instrumen penilaian, ringkasan telaah dokumen, matriks gap analysis, dan narasi analisis, dikumpulkan melalui SIAKAD UNISAN sebelum sesi Minggu 13			
			Bentuk Penilaian Tes/Unjuk Kerja: Tidak ada tes tertulis pada minggu ini; penilaian berpusat pada kualitas analisis dokumen dan laporan evaluasi awal yang mencakup: ketepatan pemilihan indikator good governance,	BP — Mekanisme kuliah: Dosen memandu workshop analisis dokumen di kelas: mendemonstrasikan cara membaca tabel realisasi kinerja LAKIP dan temuan BPK secara langsung menggunakan contoh dokumen yang diproyeksikan; memfasilitasi sesi tanya-jawab dan klarifikasi metodologi evaluasi; memberikan umpan balik langsung terhadap draft gap analysis kelompok	BP — Mekanisme kuliah: Dosen mengunggah panduan telaah dokumen publik (LPPD, LAKIP, laporan BPK) beserta template gap analysis ke Google Classroom/Microsoft 365; menyediakan rekaman penjelasan singkat (10-15 menit) tentang cara membaca dan menginterpretasi dokumen akuntabilitas pemerintah daerah; membuka sesi diskusi	Bahan Kajian: • Evaluasi kinerja pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan daerah; • Pilar akuntabilitas, transparansi, partisipasi, dan rule of law sebagai indikator evaluasi; • Telaah dokumen LPPD, LAKIP, dan laporan audit BPK sebagai sumber data evaluasi;	

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bantuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (<i>offline</i>)	Daring (<i>online</i>)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			kedalaman gap analysis (minimum 3 indikator dianalisis), keakuratan data yang bersumber dari dokumen publik resmi, dan kejelasan struktur laporan Partisipasi kelas & laboratorium: Keaktifan dalam sesi diskusi kasus berbasis dokumen publik: ketajaman pertanyaan dan argumentasi, kemampuan membedakan temuan faktual dari opini, serta menampilkan sikap kritis namun menghargai konteks lokal Kawasan Timur Indonesia	menggunakan papan tulis (tatap muka di kelas). Mekanisme & materi: Mahasiswa bekerja dalam kelompok (3-4 orang) menelaah dokumen publik yang telah disiapkan; memetakan indikator good governance ke dalam tabel gap analysis secara manual di papan tulis; mempresentasikan temuan sementara kepada kelompok lain untuk mendapatkan masukan sebelum laporan final disusun MP — Metode Pembelajaran: Case-Based Learning: workshop analisis dokumen publik nyata secara berkelompok, dilanjutkan sesi presentasi temuan awal dan diskusi kritis antar kelompok di kelas untuk memperkuat	asinkron untuk konsultasi pemilihan unit pemerintah yang akan dievaluasi (via LMS; sinkron/asinkron). Mekanisme & materi: Mahasiswa mengunduh dan menelaah secara mandiri minimal dua dokumen publik (LPPD atau LAKIP dan satu laporan audit BPK) dari unit pemerintah daerah yang dipilih; mengisi lembar kerja gap analysis secara daring menggunakan template yang disediakan; mengakses regulasi terkait melalui tautan resmi (jdih.kemenkeu.go.id, bpk.go.id, atau portal pemerintah daerah terkait) MP — Metode Pembelajaran:	• Gap analysis tata kelola pemerintahan berbasis good governance; Pustaka: Agere (2000); Sedarmayanti (2012); Pollitt dan Bouckaert (2011); Komisi Pemberantasan Korupsi (2023); Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (2023); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.	

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bantuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (<i>offline</i>)	Daring (<i>online</i>)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			Tugas: Laporan Evaluasi Awal Tata Kelola Pemerintahan Daerah: minimal 8 halaman (tidak termasuk lampiran), memuat latar belakang pemilihan unit pemerintah, kerangka indikator yang digunakan, tabel gap analysis minimum 3 indikator, temuan utama berbasis dokumen, dan lampiran dokumen yang ditelaah; dikumpulkan melalui SISTER/IAKAD UNISAN	kedalaman analisis Estimasi Waktu: PB 3×50' · PT 3×60' · KM 3×60'. Tugas: Secara berkelompok (3-4 mahasiswa), pilih satu unit pemerintah daerah di Kawasan Timur Indonesia (kabupaten/kota atau OPD tertentu). Kumpulkan dan telaah minimal dua dokumen publik resmi (LPPD, LAKIP, atau laporan audit BPK tiga tahun terakhir). Gunakan kerangka indikator good governance (akuntabilitas, transparansi, partisipasi, rule of law) untuk memetakan kondisi aktual tata kelola unit tersebut. Susun tabel gap analysis yang membandingkan standar ideal dengan temuan dokumen pada minimum tiga indikator. Laporan wajib memuat: identitas unit pemerintah, kerangka evaluasi, tabel gap analysis, narasi	Case-Based Learning: mahasiswa menganalisis dokumen nyata pemerintah daerah di Kawasan Timur Indonesia sebagai kasus, mengidentifikasi gap antara komitmen tertulis dan realisasi kinerja, kemudian mendiskusikan temuan secara asinkron di forum daring Estimasi Waktu: PB 3×50' · PT 3×60' · KM 3×60'.		

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bantuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (<i>offline</i>)	Daring (<i>online</i>)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				temuan, dan lampiran dokumen sumber. Cantumkan deklarasi penggunaan AI Generatif jika digunakan sesuai Pedoman UNISAN. Deliverable: Laporan Evaluasi Awal (PDF, minimal 8 halaman tidak termasuk lampiran) diunggah ke SISTER/SIKAD UNISAN; satu salinan cetak diserahkan kepada dosen pada sesi luring; file kerja gap analysis (Excel atau Google Sheets) dilampirkan sebagai lampiran digital			
14	Sub-CPMK8: Mengevaluasi kualitas pelayanan publik instansi pemerintah daerah di Kawasan Timur Indonesia berdasarkan standar pelayanan minimum (SPM) dan kepuasan pengguna layanan, serta menyajikan laporan evaluasi lengkap yang memuat rekomendasi	Mahasiswa mampu: • Mengukur kualitas pelayanan publik instansi pemerintah daerah menggunakan instrumen berbasis Standar Pelayanan Minimum (SPM) dan indikator kepuasan	Bentuk Penilaian Tes/Unjuk Kerja: Tidak ada tes tertulis pada minggu ini; penilaian berpusat pada laporan evaluasi lengkap yang mencakup:	BP — Mekanisme kuliah: Dosen memandu sesi klinik laporan: setiap kelompok mempresentasikan temuan dan rekomendasi evaluasi pelayanan publik (masing-masing 10-12 menit) diikuti diskusi dan umpan balik dosen dan mahasiswa	BP — Mekanisme kuliah: Dosen mengunggah template instrumen penilaian pelayanan publik berbasis SPM ke Microsoft 365/Google Workspace; menyediakan panduan pengolahan data menggunakan Excel	Bahan Kajian: • Evaluasi kinerja pelayanan publik berbasis Standar Pelayanan Minimum (SPM); • Instrumen pengukuran kepuasan pengguna layanan pemerintah	7

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bantuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (<i>offline</i>)	Daring (<i>online</i>)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	perbaikan yang dapat ditindaklanjuti.	pengguna layanan • Mengolah data hasil survei kepuasan atau data sekunder pelayanan publik menggunakan Microsoft Excel atau SPSS untuk menghasilkan skor dan profil kualitas layanan • Membandingkan hasil pengukuran dengan standar SPM yang berlaku untuk mengidentifikasi kesenjangan kritis pada dimensi pelayanan • Merumuskan rekomendasi perbaikan yang konkret, dapat ditindaklanjuti (actionable), dan mempertimbangkan keterbatasan kapasitas pemerintah daerah di Kawasan Timur Indonesia	ketepatan penggunaan instrumen pengukuran berbasis SPM, kualitas analisis data (kelengkapan tabel dan interpretasi), relevansi dan keterlaksanaan rekomendasi perbaikan dalam konteks kapasitas daerah, serta konsistensi antara temuan dan rekomendasi Partisipasi kelas & laboratorium: Keaktifan dalam sesi presentasi dan diskusi kritis antar kelompok: kemampuan mempertahankan temuan dengan data, memberikan umpan balik konstruktif	lain; dosen mengkritisi keterlaksanaan rekomendasi dengan mempertimbangkan kapasitas fiskal dan SDM daerah Kawasan Timur Indonesia (tatap muka di kelas). Mekanisme & materi: Mahasiswa menyajikan laporan evaluasi menggunakan slide dan tabel data yang diproyeksikan; kelompok lain memberikan umpan balik terstruktur menggunakan lembar penilaian sejawat; mahasiswa merevisi rekomendasi berdasarkan masukan diskusi kelas sebelum laporan final dikumpulkan MP — Metode Pembelajaran: Project-Based Learning: presentasi laporan evaluasi antar kelompok dengan	(termasuk contoh tabel dan grafik standar); membuka konsultasi asinkron terjadwal untuk kelompok yang mengalami kesulitan pengolahan data atau perumusan rekomendasi (via LMS; sinkron/asinkron). Mekanisme & materi: Mahasiswa mengakses data sekunder pelayanan publik (laporan SKM, data SPM, atau laporan kinerja OPD pelayanan) dari portal resmi pemerintah daerah yang dipilih; mengolah data menggunakan Microsoft Excel atau SPSS sesuai instrumen yang telah disusun; menyusun draf rekomendasi secara kolaboratif melalui Google Docs/Microsoft 365	daerah; • Reformasi birokrasi dan standar pelayanan publik Indonesia; • Rekomendasi perbaikan layanan berbasis data dalam konteks Kawasan Timur Indonesia; Pustaka: Pollitt dan Bouckaert (2011); Osborne dan Gaebler (1992); Sedarmayanti (2012); Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (2023); Komisi Pemberantasan Korupsi (2023); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.	

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bantuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (offline)	Daring (online)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		- Menyajikan laporan evaluasi lengkap yang memuat metodologi, data, analisis, dan rekomendasi dalam format yang terstruktur dan dapat dibaca oleh pemangku kepentingan - Menunjukkan orientasi keberpihakan pada masyarakat (nilai Service) dalam perumusan rekomendasi yang mengutamakan kepentingan pengguna layanan	kepada kelompok lain, dan menunjukkan kepekaan terhadap dimensi keadilan layanan bagi masyarakat di Kawasan Timur Indonesia Tugas: Laporan Evaluasi Pelayanan Publik Lengkap: minimal 10 halaman (tidak termasuk lampiran), memuat pendahuluan, metodologi pengukuran, instrumen penilaian, hasil analisis data (tabel/grafik), gap analysis berbasis SPM, minimum 3 rekomendasi actionable dengan justifikasi, dan lampiran data;	umpan balik terstruktur (peer review), mendorong penyempurnaan rekomendasi berdasarkan perspektif multipihak dan konteks lokal Estimasi Waktu: PB 3×50' · PT 3×60' · KM 3×60'. Tugas: Melanjutkan evaluasi unit pemerintah daerah yang sama dari Minggu 13 dengan memperdalam fokus pada kualitas pelayanan publik. Kelompok menyusun atau mengadaptasi instrumen pengukuran kualitas layanan berbasis SPM dan indikator kepuasan pengguna. Lakukan pengumpulan data sekunder (laporan SKM, data SPM, atau laporan kinerja OPD layanan dari unit yang dipilih) dan olah menggunakan Microsoft Excel atau SPSS. Analisis kesenjangan antara kondisi aktual dan standar SPM,	MP — Metode Pembelajaran: Project-Based Learning: kelompok mahasiswa melanjutkan dan memperdalam evaluasi dari Minggu 13 dengan memperluas fokus dari tata kelola umum ke kualitas pelayanan publik spesifik, menghasilkan laporan evaluasi lengkap yang siap digunakan sebagai dasar rekomendasi kebijakan Estimasi Waktu: PB 3×50' · PT 3×60' · KM 3×60'.		

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (<i>offline</i>)	Daring (<i>online</i>)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			dikumpulkan melalui SISTER/IAKAD UNISAN disertai file data olahan (Excel/SPSS)	kemudian rumuskan minimum tiga rekomendasi perbaikan yang konkret dan dapat ditindaklanjuti dengan mempertimbangkan keterbatasan kapasitas daerah. Laporan final wajib memuat: metodologi, instrumen yang digunakan, hasil analisis data (tabel dan grafik), gap analysis, rekomendasi dengan justifikasi, dan lampiran data. Cantumkan deklarasi penggunaan AI Generatif jika digunakan sesuai Pedoman UNISAN. Deliverable: Laporan Evaluasi Pelayanan Publik Lengkap (PDF, minimal 10 halaman tidak termasuk lampiran) diunggah ke SISTER/IAKAD UNISAN; file data olahan (Excel atau output SPSS) dilampirkan sebagai lampiran digital; satu salinan cetak diserahkan			

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bantuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (<i>offline</i>)	Daring (<i>online</i>)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				kepada dosen pada sesi luring			
15	Sub-CPMK10: Mempresentasikan proposal inovasi tata kelola berbasis teknologi secara kolaboratif di hadapan kelompok, mempertahankan argumen desain dengan mengintegrasikan nilai integritas, kreativitas, dan adaptabilitas, serta merespons umpan balik secara konstruktif untuk penyempurnaan proposal akhir.	Mahasiswa mampu: • Mempresentasikan proposal inovasi tata kelola berbasis teknologi secara sistematis, mencakup latar belakang masalah, desain solusi, Business Process Map, dan prototipe konseptual layanan digital • Mempertahankan argumen desain inovasi dengan mengintegrasikan bukti data dari evaluasi Minggu 13 dan 14 serta referensi konseptual yang relevan • Merespons umpan balik dari audiens dan dosen secara konstruktif dengan menyesuaikan atau memperkuat argumen desain tanpa	Bentuk Penilaian Tes/Unjuk Kerja: Tidak ada tes tertulis; penilaian mencakup: kualitas presentasi (kejelasan struktur, kedalaman argumen desain, relevansi inovasi terhadap temuan evaluasi), kemampuan mempertahankan desain dengan argumentasi berbasis data dan teori, ketepatan merespons umpan balik (konstruktif dan substantif), serta kualitas proposal final pasca-revisi yang memuat Business Process Map dan	BP — Mekanisme kuliah: Dosen memfasilitasi sesi presentasi panel: setiap kelompok mempresentasikan proposal inovasi (15 menit presentasi dan 10 menit tanya-jawab); dosen dan kelompok lain memberikan umpan balik terstruktur menggunakan rubrik yang telah dibagikan; dosen merangkum pembelajaran semester dan menghubungkan seluruh capaian CPMK dalam sesi penutup reflektif (tatap muka di kelas). Mekanisme & materi: Mahasiswa mempresentasikan proposal menggunakan slide dan Business Process Map yang diproyeksikan; anggota kelompok	BP — Mekanisme kuliah: Dosen mengunggah rubrik penilaian presentasi dan peer review ke Microsoft 365/Google Workspace sebelum sesi; menyediakan panduan respons umpan balik yang konstruktif dan checklist kelengkapan proposal final; membuka sesi konsultasi singkat asinkron pasca-presentasi untuk mendampingi revisi proposal (via LMS; sinkron/asinkron). Mekanisme & materi: Mahasiswa mengunggah slide presentasi final ke platform berbagi (Google Drive/OneDrive) sebelum sesi luring; melengkapi Business Process Map menggunakan Miro atau	Bahan Kajian: • Inovasi e-government berbasis kebutuhan lokal Kawasan Timur Indonesia; • Prototipe konseptual layanan digital pemerintahan; • Technopreneurship sektor publik dan kewirausahaan pemerintahan; • Integrasi nilai integritas, kreativitas, dan adaptabilitas dalam perancangan tata kelola; Pustaka: Osborne dan Gaebler (1992); Stoker (1998); Sedarmayanti (2012); Pollitt dan Bouckaert (2011); Kementerian Pendayagunaan Aparatur	7

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bantuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (<i>offline</i>)	Daring (<i>online</i>)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		meninggalkan prinsip integritas pelaporan • Menunjukkan kreativitas dalam perancangan solusi yang adaptif terhadap keterbatasan infrastruktur digital di Kawasan Timur Indonesia • Berkolaborasi secara harmonis dalam tim dengan pembagian peran yang jelas selama sesi presentasi, mencerminkan nilai Harmony dan Service • Menyempurnakan proposal akhir berdasarkan umpan balik yang diterima selama sesi presentasi, menghasilkan dokumen final yang siap dijadikan referensi kebijakan	prototipe konseptual yang lengkap Partisipasi kelas & laboratorium: Keaktifan seluruh anggota kelompok selama presentasi dan sesi tanya-jawab: distribusi peran yang merata, kualitas pertanyaan yang diajukan kepada kelompok lain, sikap terbuka terhadap kritik, dan kemampuan berargumentasi dengan mengedepankan integritas data serta kreativitas solusi Tugas: Proposal Inovasi Tata Kelola	membagi peran (penyaji utama, penjawab teknis, pencatat umpan balik); kelompok lain mengisi lembar peer review; setelah semua kelompok tampil, seluruh mahasiswa berdiskusi reflektif tentang relevansi inovasi tata kelola digital bagi penguatan pemerintahan daerah di Kawasan Timur Indonesia MP — Metode Pembelajaran: Project-Based Learning dengan presentasi panel: simulasi forum kebijakan publik di mana setiap kelompok berperan sebagai tim perencana inovasi yang mempertahankan proposal di hadapan pemangku kepentingan, diikuti sesi revisi berbasis umpan balik untuk menghasilkan dokumen final	Lucidchart versi daring; menyusun catatan respons terhadap umpan balik yang diterima selama presentasi sebagai dasar revisi proposal final MP — Metode Pembelajaran: Project-Based Learning: mahasiswa mengintegrasikan seluruh hasil proyek semester (analisis good governance, evaluasi tata kelola, evaluasi pelayanan publik) ke dalam satu proposal inovasi yang dipresentasikan dan dipertahankan secara kolaboratif Estimasi Waktu: PB 3×50' · PT 3×60' · KM 3×60'.	Negara dan Reformasi Birokrasi (2023).	

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bantuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (<i>offline</i>)	Daring (<i>online</i>)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			Digital Final (pasca-revisi): dokumen PDF minimal 12 halaman mencakup latar belakang, rumusan masalah berbasis temuan evaluasi, desain inovasi, Business Process Map, prototipe konseptual layanan digital, rencana implementasi, dan daftar pustaka; disertai file Business Process Map (Miro/Lucidchart/ format digital) dan slide presentasi; dikumpulkan melalui SISTER/IAKAD UNISAN paling lambat 3 hari setelah sesi presentasi	Estimasi Waktu: PB 3×50' · PT 3×60' · KM 3×60'. Tugas: Setiap kelompok mempresentasikan proposal inovasi tata kelola berbasis teknologi yang telah dikembangkan sepanjang semester, mengintegrasikan temuan evaluasi dari Minggu 13 (tata kelola) dan Minggu 14 (pelayanan publik) sebagai justifikasi masalah. Proposal wajib memuat: rumusan masalah berbasis data evaluasi, desain inovasi e-government yang responsif terhadap konteks Kawasan Timur Indonesia, Business Process Map alur layanan digital, prototipe konseptual (dapat berupa wireframe, flowchart layanan, atau model konseptual), rencana implementasi dengan mempertimbangkan keterbatasan infrastruktur, dan analisis dampak yang			

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bantuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (<i>offline</i>)	Daring (<i>online</i>)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				diharapkan. Setelah presentasi, kelompok merevisi proposal berdasarkan umpan balik yang diterima, mendokumentasikan perubahan yang dilakukan beserta alasannya dalam satu halaman catatan revisi. Cantumkan deklarasi penggunaan AI Generatif jika digunakan sesuai Pedoman UNISAN. Deliverable: Proposal Inovasi Tata Kelola Digital Final (PDF, minimal 12 halaman) beserta catatan revisi (1 halaman) diunggah ke SISTER/SLAKAD UNISAN paling lambat 3 hari setelah sesi presentasi; file Business Process Map (Miro/Lucidchart/format digital) dan slide presentasi (PPT/PDF) dikumpulkan bersama sebagai lampiran digital; satu salinan cetak dokumen final diserahkan kepada dosen			

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bantuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (<i>offline</i>)	Daring (<i>online</i>)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
16		Mahasiswa mampu: • Menunjukkan penguasaan konsep dan prinsip good governance serta penerapannya dalam konteks tata kelola pemerintahan Indonesia secara komprehensif • Menganalisis dan mensintesis keterkaitan antar-topik yang telah dipelajari sepanjang semester, dari konsep dasar hingga inovasi tata kelola digital • Mengevaluasi kasus atau skenario tata kelola pemerintahan dengan menggunakan kerangka teori dan regulasi yang relevan • Merumuskan argumen atau rekomendasi kebijakan secara tertulis	Bentuk Penilaian Tes/Unjuk Kerja: Ujian Akhir Semester tertulis (daring atau luring sesuai kebijakan UNISAN) yang mencakup seluruh materi semester: soal esai analitis atau studi kasus yang menuntut kemampuan analisis, evaluasi, dan sintesis (minimal level C4-C5 Taksonomi Bloom); kriteria penilaian meliputi ketepatan konsep, kedalaman analisis, kemampuan menghubungkan teori dengan kasus nyata, dan kelogisan	BP — Mekanisme kuliah: Dosen atau pengawas memastikan kelancaran pelaksanaan UAS sesuai tata tertib UNISAN; dosen memberikan penjelasan singkat mekanisme ujian sebelum soal dibagikan; setelah ujian selesai, dosen dapat menyampaikan pesan penutup semester secara ringkas (tatap muka di kelas). Mekanisme & materi: Mahasiswa mengerjakan soal UAS secara individual, tertulis, dan mandiri dalam durasi yang telah ditetapkan; menjawab soal esai atau analisis kasus dengan mengacu pada konsep, teori, dan regulasi yang dipelajari sepanjang semester	BP — Mekanisme kuliah: Dosen mengunggah informasi teknis pelaksanaan UAS (waktu, platform, tata tertib) ke SISTER/SIKAD UNISAN; menyediakan kisi-kisi cakupan materi UAS (bukan soal atau kunci jawaban) agar mahasiswa dapat mempersiapkan diri secara terarah; membuka sesi tanya-jawab persiapan singkat secara asinkron sebelum hari UAS (via LMS; sinkron/asinkron). Mekanisme & materi: Mahasiswa melakukan kajian mandiri dan review seluruh materi semester menggunakan catatan, dokumen tugas, dan referensi pustaka yang telah digunakan; mempersiapkan	Bahan Kajian: • Integrasi seluruh materi semester: konsep good governance, pilar akuntabilitas dan transparansi, sistem pemerintahan Indonesia, otonomi daerah, tata kelola desa, manajemen pemerintahan, evaluasi pelayanan publik, dan inovasi e-government; Pustaka: Osborne dan Gaebler (1992); Stoker (1998); Agere (2000); Prasetyo dan Hoessein (2002); Pollitt dan Bouckaert (2011); Sedarmayanti (2012); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (2023).	—

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (<i>offline</i>)	Daring (<i>online</i>)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		berdasarkan analisis yang terstruktur dan didukung referensi	argumentasi Partisipasi kelas & laboratorium: Kepatuhan terhadap tata tertib ujian dan integritas akademik: kejujuran dalam pelaksanaan ujian, pengerjaan mandiri tanpa pelanggaran, dan pengelolaan waktu yang efektif Tugas: Tidak ada tugas tambahan pada minggu ujian; mahasiswa memastikan seluruh tugas sebelumnya telah diunggah ke SISTER/IAKAD UNISAN sebelum pelaksanaan UAS	MP — Metode Pembelajaran: Penilaian sumatif individual: ujian tertulis esai analitis atau studi kasus yang mengukur penguasaan dan integrasi capaian pembelajaran Mata Kuliah Tata Kelola Pemerintahan secara keseluruhan Estimasi Waktu: PB 3×50' · PT 3×60' · KM 3×60'. Tugas: Tidak ada penugasan kelompok atau proyek tambahan pada Minggu 16. Mahasiswa memfokuskan diri pada persiapan UAS dengan mengkaji ulang seluruh materi dan memastikan kelengkapan pengumpulan seluruh tugas sebelumnya melalui SISTER/IAKAD UNISAN sebelum pelaksanaan ujian.	kemampuan analisis lintas topik dari good governance, otonomi daerah, manajemen pemerintahan, evaluasi pelayanan publik, hingga inovasi e-government MP — Metode Pembelajaran: Penilaian sumatif individual: ujian tertulis berbasis kasus atau esai analitis yang mengintegrasikan capaian pembelajaran seluruh Sub-CPMK semester Estimasi Waktu: PB 3×50' · PT 3×60' · KM 3×60'.		

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bantuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (<i>offline</i>)	Daring (<i>online</i>)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Deliverable: Lembar jawaban UAS (tertulis atau daring sesuai kebijakan UNISAN); tidak ada deliverable tugas tambahan pada minggu ini			

Catatan :

1. **Capaian Pembelajaran Lulusan PRODI (CPL-PRODI)** adalah kemampuan yang dimiliki oleh setiap lulusan PRODI yang merupakan internalisasi dari sikap, penguasaan pengetahuan dan ketrampilan sesuai dengan jenjang prodinya yang diperoleh melalui proses pembelajaran.
2. **CPL yang dibebankan pada mata kuliah** adalah beberapa capaian pembelajaran lulusan program studi (CPL-PRODI) yang digunakan untuk pembentukan/pengembangan sebuah mata kuliah yang terdiri dari aspek sikap, ketrampilan umum, ketrampilan khusus dan pengetahuan.
3. **CP Mata kuliah (CPMK)** adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPL yang dibebankan pada mata kuliah, dan bersifat spesifik terhadap bahan kajian atau materi pembelajaran mata kuliah tersebut.
4. **Sub-CP Mata kuliah (Sub-CPMK)** adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPMK yang dapat diukur atau diamati dan merupakan kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran, dan bersifat spesifik terhadap materi pembelajaran mata kuliah tersebut.
5. **Indikator penilaian** kemampuan dalam proses maupun hasil belajar mahasiswa adalah pernyataan spesifik dan terukur yang mengidentifikasi kemampuan atau kinerja hasil belajar mahasiswa yang disertai bukti-bukti.
6. **Kreteria Penilaian** adalah patokan yang digunakan sebagai ukuran atau tolok ukur ketercapaian pembelajaran dalam penilaian berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan. Kreteria penilaian merupakan pedoman bagi penilai agar penilaian konsisten dan tidak bias. Kreteria dapat berupa kuantitatif ataupun kualitatif.
7. **Bentuk penilaian:** tes dan non-tes.
8. **Bentuk pembelajaran:** Kuliah, Responsi, Tutorial, Seminar atau yang setara, Praktikum, Praktik Studio, Praktik Bengkel, Praktik Lapangan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan/atau bentuk pembelajaran lain yang setara.
9. **Metode Pembelajaran:** Small Group Discussion, Role-Play & Simulation, Discovery Learning, Self-Directed Learning, Cooperative Learning, Collaborative Learning, Contextual Learning, Project Based Learning, dan metode lainnya yg setara.
10. **Materi Pembelajaran** adalah rincian atau uraian dari bahan kajian yg dapat disajikan dalam bentuk beberapa pokok dan sub-pokok bahasan.
11. **Bobot penilaian** adalah prosentasi penilaian terhadap setiap pencapaian sub-CPMK yang besarnya proposional dengan tingkat kesulitan pencapaian sub-CPMK tsb., dan totalnya 100%.
12. **PB=** Kegiatan Belajar Terbimbing, **PT=**Kegiatan Penugasan Terstruktur, **KM=**Kegiatan Mandiri, **P=**Praktikum.

3. Komponen Penilaian

No.	Komponen Penilaian	Bobot (%)	Deskripsi
1	Tugas Analisis Kasus	10	
2	Kuis Konsep	10	
3	UTS	20	
4	UAS	20	
5	Proyek Inovasi Tata Kelola	40	
	Total Bobot (%)	100	

Rekonsiliasi Bobot Komponen Penilaian dengan Bobot Sub-CPMK

Bobot komponen penilaian pada tabel di atas dan bobot Sub-CPMK merupakan dua cara pandang atas nilai akhir yang sama: penjumlahan menurut baris menghasilkan bobot Sub-CPMK, penjumlahan menurut kolom menghasilkan bobot komponen penilaian.

Sub-CPMK	Tugas Analisis Kasus	Kuis Konsep	UTS	UAS	Proyek Inovasi Tata Kelola	Bobot Sub-CPMK (%)
Sub-CPMK1	—	5	4	—	—	9
Sub-CPMK2	4	5	4	—	—	13
Sub-CPMK3	3	—	4	—	—	7
Sub-CPMK4	3	—	4	—	—	7
Sub-CPMK5	—	—	4	—	7	11
Sub-CPMK6	—	—	—	4	7	11
Sub-CPMK7	—	—	—	4	7	11
Sub-CPMK8	—	—	—	4	7	11
Sub-CPMK9	—	—	—	4	6	10
Sub-CPMK10	—	—	—	4	6	10
Bobot Komponen (%)	10	10	20	20	40	100

Nilai Akhir Program Sarjana — Kurikulum 2023

Nilai Akhir	Konversi	
Skala 100	Huruf	Bobot
85.00 – 100.00	A	4.00
75.00 – 84.99	B	3.00

65.00 – 74.99	C	2.00
50.00 – 64.99	D	1.00
0.00 – 49.99	E	0.00

4. Rencana Tugas

Rencana Tugas: Final Project: Evaluasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah dan Perancangan Inovasi Layanan Publik Berbasis E-Government di Kawasan Timur Indonesia

	UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN S1				
RENCANA TUGAS MAHASISWA					
MATA KULIAH	Tata Kelola Pemerintahan				
KODE	3KKBP204	sks	3	SEMESTER	3
DOSEN PENGAMPU	Dr. Sandi Prahara, S.T., M.Si.				
METODE PENUGASAN					
Project-Based Learning (PjBL) / Case-Based Learning (CBL)					
JUDUL TUGAS					
Final Project: Evaluasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah dan Perancangan Inovasi Layanan Publik Berbasis E-Government di Kawasan Timur Indonesia					
SUB CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH					
Sub-CPMK4: Menganalisis relasi pusat–daerah, otonomi daerah, dan tata kelola pemerintahan desa dengan menguraikan keterkaitan antara regulasi desentralisasi, kewenangan, dan praktik nyata tata kelola di Kawasan Timur Indonesia melalui studi kasus kabupaten/kota terpilih.					

Sub-CPMK7: Mengevaluasi kualitas tata kelola pemerintahan daerah di Kawasan Timur Indonesia menggunakan instrumen penilaian berbasis indikator good governance melalui telaah dokumen publik (LPPD, LAKIP, laporan audit) dan wawancara/observasi terbatas, serta menghasilkan laporan evaluasi awal yang memuat temuan dan gap analysis.

Sub-CPMK8: Mengevaluasi kualitas pelayanan publik instansi pemerintah daerah di Kawasan Timur Indonesia berdasarkan standar pelayanan minimum (SPM) dan kepuasan pengguna layanan, serta menyajikan laporan evaluasi lengkap yang memuat rekomendasi perbaikan yang dapat ditindaklanjuti.

Sub-CPMK9: Merancang konsep inovasi tata kelola dan pelayanan publik berbasis e-government/technopreneurship yang adaptif terhadap kebutuhan masyarakat lokal Kawasan Timur Indonesia, dibuktikan dengan Business Process Map (as-is vs. to-be) dan prototipe konseptual layanan digital yang mengintegrasikan nilai integritas dan keberpihakan lokal.

Sub-CPMK10: Mempresentasikan proposal inovasi tata kelola berbasis teknologi secara kolaboratif di hadapan kelompok, mempertahankan argumen desain dengan mengintegrasikan nilai integritas, kreativitas, dan adaptabilitas, serta merespons umpan balik secara konstruktif untuk penyempurnaan proposal akhir.

DISKRIPSI TUGAS

Mahasiswa secara berkelompok melakukan evaluasi komprehensif kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik pada satu instansi/unit pemerintah daerah (kabupaten/kota) terpilih di Kawasan Timur Indonesia — menggunakan telaah dokumen publik (LPPD, LAKIP, laporan BPK/APIP), observasi terbatas, dan wawancara pemangku kepentingan — kemudian merancang proposal inovasi e-government beserta Business Process Map (as-is vs. to-be) dan prototipe konseptual layanan digital yang merespons gap yang ditemukan, serta mempresentasikannya secara kolaboratif untuk mempertahankan argumen desain. Proyek ini mengintegrasikan nilai ICHSA-N: Integrity (akurasi data dan kejujuran pelaporan), Creativity (desain inovasi yang orisinal), Harmony (kolaborasi tim lintas perspektif), Service (orientasi kepada masyarakat penerima layanan), Adaptability (desain yang kontekstual terhadap keterbatasan infrastruktur KTI), dan Nationalism (keberpihakan pada kepentingan masyarakat lokal).

CAKUPAN UTAMA KERTAS KERJA (Contoh berdasarkan berbagai kasus)

Pemilihan dan profiling instansi pemerintah daerah di Kawasan Timur Indonesia sebagai objek studi (kabupaten/kota terpilih)

Telaah dokumen publik: LPPD, LAKIP/SAKIP, laporan audit BPK/APIP, dan dokumen SPM instansi terpilih
Wawancara dan/atau observasi terbatas terhadap minimal 5 responden (aparatur dan/atau pengguna layanan)

Evaluasi tata kelola menggunakan instrumen berbasis indikator good governance (akuntabilitas, transparansi, partisipasi, rule of law, efektivitas, efisiensi)

Gap analysis antara kondisi aktual tata kelola/pelayanan publik dengan standar normatif (SPM, regulasi desentralisasi)

Perancangan Business Process Map as-is (proses layanan eksisting) vs. to-be (proses inovasi yang diusulkan)

Pengembangan prototipe konseptual layanan digital (mockup/wireframe atau narasi teknis terstruktur) berbasis e-government yang adaptif terhadap konteks KTI

Analisis kelayakan implementasi inovasi: regulasi, SDM aparatur, anggaran, dan infrastruktur digital daerah

Presentasi dan sesi tanya-jawab (pitching proposal inovasi) di hadapan kelompok lain dan dosen

LANGKAH Pengerjaan Tugas

Langkah 1 (Mg 9–10) — Pembentukan Kelompok & Pemilihan Kasus: Bentuk kelompok 4–5 orang; pilih dan sepakati satu instansi/unit pemerintah daerah di KTI sebagai objek studi; susun proposal singkat (1–2 hal.) yang memuat latar belakang pemilihan kasus, ruang lingkup evaluasi, dan pembagian peran anggota — kumpulkan untuk disetujui dosen.

Langkah 2 (Mg 10–11) — Pengumpulan & Verifikasi Data: Kumpulkan dokumen publik (LPPD, LAKIP, laporan audit, dokumen SPM); rancang panduan wawancara/observasi; laksanakan wawancara terbatas (≥5 responden); dokumentasikan data mentah dalam matriks data terstruktur. Nilai integritas ditekankan: data harus dapat diverifikasi sumbernya.

Langkah 3 (Mg 11–12) — Evaluasi Tata Kelola & Pelayanan Publik: Analisis data menggunakan instrumen indikator good governance; bandingkan temuan dengan standar regulasi (UU No. 23/2014, PP terkait SPM); susun gap analysis yang memuat temuan utama per dimensi good governance; hasilkan laporan evaluasi awal (draft) untuk review dosen.

Langkah 4 (Mg 12–13) — Perancangan Inovasi E-Government: Berdasarkan gap analysis, identifikasi prioritas masalah yang akan diselesaikan inovasi; rancang Business Process Map as-is vs. to-be; kembangkan prototipe konseptual layanan digital (mockup/wireframe aplikasi atau portal, atau narasi teknis terstruktur jika keterbatasan

alat); analisis kelayakan implementasi dari aspek regulasi, SDM, anggaran, dan infrastruktur digital KTI. Nilai adaptabilitas dan technopreneurship ditekankan.

Langkah 5 (Mg 13–14) — Penyusunan Laporan Akhir & Slide Presentasi: Integrasikan seluruh komponen (profil kasus, evaluasi tata kelola, evaluasi pelayanan publik, gap analysis, rancangan inovasi, kelayakan implementasi, rekomendasi) ke dalam laporan akhir terstruktur; susun slide presentasi (12–18 slide) yang ringkas, berbasis bukti, dan komunikatif.

Langkah 6 (Mg 15) — Presentasi & Pitching Proposal Inovasi: Setiap kelompok mempresentasikan (15 menit) dan mempertahankan argumen desain dalam sesi tanya-jawab (10 menit); kelompok lain memberikan umpan balik terstruktur menggunakan formulir peer-review; nilai integritas, kreativitas, dan adaptabilitas dinilai pada tahap ini.

Langkah 7 (Mg 15–16) — Revisi & Pengumpulan Final: Kelompok merevisi laporan berdasarkan umpan balik dosen dan peer; kumpulkan versi final laporan beserta lampiran data (transkrip wawancara, dokumen sumber, prototipe) paling lambat akhir Mg 16.

BENTUK DAN FORMAT LUARAN

a. Laporan Akhir terstruktur (min. 25 hal., tidak termasuk lampiran) memuat: profil instansi, metodologi pengumpulan data, evaluasi tata kelola berbasis indikator good governance, evaluasi pelayanan publik vs. SPM, gap analysis, Business Process Map as-is vs. to-be, prototipe konseptual layanan digital, analisis kelayakan, dan rekomendasi terukur yang dapat ditindaklanjuti. 2) Prototipe Konseptual: mockup/wireframe (min. 3 layer) atau narasi teknis terstruktur layanan digital e-government. 3) Slide Presentasi (12–18 slide, format PDF/PPTX). 4) Lampiran Data: matriks data, transkrip/notulen wawancara (≥5 responden), dan salinan/tautan dokumen publik yang ditelaah. 5) Lembar Kontribusi Individu yang ditandatangani seluruh anggota kelompok.

INDIKATOR, KRITERIA DAN BOBOT PENILAIAN

a. Kualitas Evaluasi Tata Kelola & Pelayanan Publik (bobot 30%). Laporan memuat analisis sistematis berbasis instrumen good governance terhadap dokumen publik dan data lapangan (≥5 responden), menghasilkan gap analysis yang tajam, spesifik per dimensi, dan didukung bukti yang dapat diverifikasi — bukan deskripsi umum.

b. Kedalaman & Orisinalitas Rancangan Inovasi E-Government (bobot 25%). Business Process Map as-is vs. to-be disusun lengkap dan logis; prototipe konseptual layanan digital orisinal, adaptif terhadap konteks keterbatasan infrastruktur KTI, disertai analisis kelayakan (regulasi, SDM, anggaran, infrastruktur) yang realistis dan terukur.

c. Kualitas Rekomendasi & Relevansi Kontekstual KTI (bobot 20%). Rekomendasi perbaikan tata kelola dan inovasi layanan dirumuskan secara spesifik, terukur, dan dapat ditindaklanjuti; menunjukkan keberpihakan lokal terhadap kebutuhan masyarakat Kawasan Timur Indonesia serta mempertimbangkan kondisi riil kapasitas pemerintah daerah setempat.

d. Kualitas Presentasi & Pertahanan Argumen (bobot 15%). Penyajian sistematis, ringkas berbasis bukti, dan komunikatif; kelompok mampu mempertahankan argumen desain dengan logika yang koheren, merespons pertanyaan secara konstruktif, dan mengintegrasikan nilai integritas serta kreativitas dalam pemilihan solusi yang diusulkan.

e. Kelengkapan Laporan & Sistematika Penulisan Akademik (bobot 10%). Laporan memenuhi seluruh komponen yang disyaratkan (profil kasus, metodologi, evaluasi, gap analysis, rancangan inovasi, kelayakan, rekomendasi, lampiran data), ditulis dalam bahasa Indonesia akademik, mengikuti format yang ditetapkan, dan mencantumkan referensi yang valid sesuai daftar pustaka RPS.

JADWAL PELAKSANAAN

Mg 9: Pengumuman final project; pembentukan kelompok (4–5 orang); briefing metode dan rubrik penilaian oleh dosen

Mg 10: Pengumpulan proposal singkat (latar belakang kasus, ruang lingkup, pembagian peran); persetujuan objek studi oleh dosen

Mg 10–11: Pengumpulan dan verifikasi data (telaah dokumen publik + pelaksanaan wawancara/observasi terbatas ≥5 responden)

Mg 11–12: Analisis evaluasi tata kelola dan pelayanan publik; penyusunan gap analysis; review draft evaluasi oleh dosen (konsultasi wajib)

Mg 12–13: Perancangan Business Process Map as-is vs. to-be; pengembangan prototipe konseptual layanan digital; analisis kelayakan implementasi

Mg 13–14: Integrasi seluruh komponen ke laporan akhir; penyusunan slide presentasi; konsultasi akhir dengan dosen Mg 15: Presentasi & pitching proposal inovasi (semua kelompok); sesi tanya-jawab dan peer-review terstruktur Mg 16: Pengumpulan laporan final yang telah direvisi beserta seluruh lampiran (batas akhir)	
LAIN-LAIN	
Final project dikerjakan secara berkelompok (4–5 mahasiswa per kelompok), namun setiap anggota wajib mengumpulkan Lembar Kontribusi Individu yang merinci tugas spesifik yang dikerjakan dan ditandatangani seluruh anggota; dosen berhak melakukan verifikasi kontribusi melalui tanya-jawab individual pada sesi presentasi, dan nilai individu dapat disesuaikan apabila kontribusi terbukti tidak proporsional. Konsultasi progres wajib dilakukan minimal dua kali (Mg 11–12 dan Mg 13–14) dengan bukti catatan konsultasi yang ditandatangani dosen; kelompok yang tidak melaksanakan konsultasi wajib dikenai pengurangan 10 poin dari nilai akhir proyek. Keterlambatan pengumpulan proposal singkat (Mg 10) dikenai penalti 5 poin/hari; keterlambatan pengumpulan laporan final (Mg 16) dikenai penalti 10 poin/hari kerja; pengumpulan lebih dari 3 hari kerja setelah batas akhir tidak diterima dan kelompok memperoleh nilai 0 untuk komponen laporan. Objek studi diutamakan instansi pemerintah daerah di wilayah Sulawesi, Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat, NTT, atau NTB; penggunaan data publik yang tersedia secara daring (portal PPID, SIPD, BPS) diperbolehkan dan harus dicantumkan sumbernya secara transparan sebagai wujud nilai Integrity dan Nationalism.	
DAFTAR RUJUKAN	
Osborne, S. P. (2010). <i>The New Public Governance? Emerging Perspectives on the Theory and Practice of Public Governance</i>. Routledge. Pollitt, C., & Bouckaert, G. (2011). <i>Public Management Reform: A Comparative Analysis — New Public Management, Governance, and the Neo-Weberian State</i> (3rd ed.). Oxford University Press. Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative Governance in Theory and Practice. <i>Journal of Public Administration Research and Theory</i>, 18(4), 543–571. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. UNDP. (1997). <i>Governance for Sustainable Human Development: A UNDP Policy Document</i>. United Nations Development Programme.	

5.1 Tugas Analisis Kasus

Nama Mahasiswa		NIM			
Judul Tugas		Tugas Analisis Kasus			
No	Kriteria	Skor Penilaian			
		Sangat Baik (85-100)	Baik (70-84)	Cukup (60-69)	Kurang (<60)
1	Penguasaan materi	Menguasai penuh, menjelaskan lugas & benar	Menguasai, sedikit ragu	Sebagian kurang tepat	Banyak kekeliruan
2	Organisasi & sistematika	Runtut, logis, mudah diikuti	Runtut, sedikit lompatan	Kurang runtut	Tidak terstruktur
3	Media & visual	Menarik, jelas, mendukung isi	Cukup jelas	Kurang mendukung	Tidak membantu
4	Komunikasi & bahasa tubuh	Percaya diri, kontak mata, intonasi tepat	Cukup baik	Datar/bergantung catatan	Cemas, membaca terus
5	Tanggapan pertanyaan	Menjawab tepat & meyakinkan	Menjawab memadai	Menjawab sebagian	Tidak mampu menjawab

5.2 Kuis Konsep (Holistik)

Nama Mahasiswa		NIM			
Judul Tugas		Kuis Konsep			
No	Kriteria	Skor Penilaian			
		Sangat Baik (85-100)	Baik (70-84)	Cukup (60-69)	Kurang (<60)
1	Pemahaman konsep	Tepat & menyeluruh	Tepat	Sebagian keliru	Salah paham
2	Ketepatan jawaban/argumen	Tepat & didukung alasan kuat	Tepat	Kurang tepat	Tidak tepat
3	Kelengkapan	Menjawab seluruh tuntutan soal	Hampir lengkap	Sebagian	Tidak lengkap
4	Struktur & logika	Runtut & koheren	Runtut	Kurang runtut	Kacau
5	Bahasa	Jelas, baku, efektif	Jelas	Kurang jelas	Sulit dipahami

5.3 UTS (Holistik)

Nama Mahasiswa		NIM			
Judul Tugas		UTS			
No	Kriteria	Skor Penilaian			
		Sangat Baik (85-100)	Baik (70-84)	Cukup (60-69)	Kurang (<60)
1	Pemahaman konsep	Tepat & menyeluruh	Tepat	Sebagian keliru	Salah paham
2	Ketepatan jawaban/argumen	Tepat & didukung alasan kuat	Tepat	Kurang tepat	Tidak tepat
3	Kelengkapan	Menjawab seluruh tuntutan soal	Hampir lengkap	Sebagian	Tidak lengkap
4	Struktur & logika	Runtut & koheren	Runtut	Kurang runtut	Kacau
5	Bahasa	Jelas, baku, efektif	Jelas	Kurang jelas	Sulit dipahami

5.4 UAS (Holistik)

Nama Mahasiswa		NIM			
Judul Tugas		UAS			
No	Kriteria	Skor Penilaian			
		Sangat Baik (85-100)	Baik (70-84)	Cukup (60-69)	Kurang (<60)

1	Pemahaman konsep	Tepat & menyeluruh	Tepat	Sebagian keliru	Salah paham
2	Ketepatan jawaban/argumen	Tepat & didukung alasan kuat	Tepat	Kurang tepat	Tidak tepat
3	Kelengkapan	Menjawab seluruh tuntutan soal	Hampir lengkap	Sebagian	Tidak lengkap
4	Struktur & logika	Runtut & koheren	Runtut	Kurang runtut	Kacau
5	Bahasa	Jelas, baku, efektif	Jelas	Kurang jelas	Sulit dipahami

5.5 Proyek Inovasi Tata Kelola

Nama Mahasiswa		NIM			
Judul Tugas		Proyek Inovasi Tata Kelola			
No	Kriteria	Skor Penilaian			
		Sangat Baik (85-100)	Baik (70-84)	Cukup (60-69)	Kurang (<60)
1	Penguasaan materi	Menguasai penuh, menjelaskan lugas & benar	Menguasai, sedikit ragu	Sebagian kurang tepat	Banyak kekeliruan
2	Organisasi & sistematika	Runtut, logis, mudah diikuti	Runtut, sedikit lompatan	Kurang runtut	Tidak terstruktur
3	Media & visual	Menarik, jelas, mendukung isi	Cukup jelas	Kurang mendukung	Tidak membantu
4	Komunikasi & bahasa tubuh	Percaya diri, kontak mata, intonasi tepat	Cukup baik	Datar/bergantung catatan	Cemas, membaca terus
5	Tanggapan pertanyaan	Menjawab tepat & meyakinkan	Menjawab memadai	Menjawab sebagian	Tidak mampu menjawab

6. Norma Akademik

1. Kehadiran minimal 75% dari total pertemuan menjadi syarat mengikuti UAS.
2. Toleransi keterlambatan masuk kelas 15 menit; lewat itu dianggap tidak hadir pada sesi tsb kecuali ada izin dosen.
3. Tugas dikumpulkan via LMS sesuai tenggat yang ditetapkan; keterlambatan dikenakan pengurangan nilai sesuai kebijakan dosen pengampu.
4. Integritas akademik ditegakkan penuh -- plagiarisme, joki, atau pemalsuan data/karya dikenakan sanksi akademik sesuai Pedoman Akademik UNISAN.
5. Pemanfaatan Generative AI (GenAI) wajib disitasi sesuai format yang ditetapkan; dilarang dipakai saat UTS/UAS/kuis kecuali diizinkan eksplisit oleh dosen.
6. Gawai (ponsel/laptop) disenyapkan selama perkuliahan, dipakai hanya untuk keperluan pembelajaran atas izin dosen.
7. Kerahasiaan data narasumber/subjek penelitian dijaga sesuai UU No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (PDP).
8. Komunikasi dosen-mahasiswa dilakukan melalui kanal resmi (LMS/email institusi), bukan kanal pribadi.